



**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
PERWAKILAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Jalan Parangtritis KM 5,5 Sewon Yogyakarta 55187 Telp : (0274) 385323, 445271
Fax : (0274) 415984 Email : yogya@bpkp.go.id

**NOTA DINAS
Nomor: PE.11.03/ND-155/PW12/6/2023**

Dari : Kepala Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta
Kepada : Korwas Bidang P3A
Hal : Pengembalian Laporan Kegiatan Nomor
PE.11.03/LPP-03/PW12.6/2023

Bersama ini kami menyetujui Laporan Kegiatan Nomor PE.11.03/LPP-03/PW12.6/2023 tanggal 9 Januari 2023 hal Laporan Kinerja Perwakilan BPKP D.I.Yogyakarta sampai dengan Triwulan IV Tahun 2022, dan selanjutnya kami kembalikan untuk diadministrasikan di bidang Saudara.

Demikian disampaikan, untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebaik-baiknya.

Yogyakarta, 20 Januari 2023

Kepala Perwakilan,

Ditandatangani secara elektronik oleh

Adi Gemawan



• UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

• "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE



BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBAGUNAN
Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta



LAPORAN KINERJA
PERWAKILAN BPKP DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
S.D. TRIWULAN IV TAHUN 2022

PE11.03/LPP-03/PW12.6/2023

9 JANUARI 2023



**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
PERWAKILAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Jalan Parangtritis KM 5,5 Sewon Yogyakarta 55187 Telp : (0274) 385323, 445271
Fax : (0274) 415984 Email : yogya@bpkp.go.id

Nomor : PE.11.03/LPP-03/PW12.6/2023

9 Januari 2023

Lampiran : Empat Eksemplar

Hal : Laporan Kinerja Perwakilan BPKP
Daerah Istimewa Yogyakarta s.d.
Triwulan IV Tahun 2022

Yth. Kepala Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta
di tempat

Berikut kami sampaikan laporan kinerja Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta s.d. Triwulan IV tahun 2022.

1. Dasar Penugasan

Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP D. I. Yogyakarta Nomor PE.11.03/ST-17/PW12/6/2023 tanggal 2 Januari 2023.

2. Pencapaian Target *Outcome* sesuai Perjanjian Kinerja

a. Pengawasan

Sesuai dengan perjanjian kinerja revisi tahun 2022, Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta mempunyai 36 indikator kinerja kegiatan (IKK). Sampai dengan Triwulan IV tahun 2022 capaian kinerja diuraikan sebagai berikut:

1) IKK: Nilai Optimalisasi Penerimaan Daerah yang Terealisasi

Nilai optimalisasi penerimaan negara/ daerah yang terealisasi berdasarkan hasil pengawasan Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta sebesar Rp7.653.791.372,00

Sampai dengan Triwulan IV tahun 2022, nilai optimalisasi penerimaan daerah yang terealisasi berdasarkan hasil pengawasan BPKP tahun 2022 adalah sebesar Rp7.653.791.372,00 atau atau mencapai 135,93% (nilai maksimal 120%) dari target tahun 2022 sebesar Rp5.630.000.000,00.

Faktor-faktor pendukung capaian target di atas 120% adalah kesadaran Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya, Pemerintah Daerah melakukan intensifikasi pajak antara lain dengan pro aktif mendata dan menagih Wajib Pajak, serta adanya kebijakan relaksasi dengan menghapus denda pajak.

Rincian nilai optimalisasi penerimaan daerah yang terealisasi sebesar Rp7.653.791.372,00 sebagai berikut:

No	Uraian	Nilai (Rp)
1.	Setoran pajak Hotel, Restoran, dan Hiburan Kabupaten Magelang	2.646.759.060,00
2.	Setoran pajak Hotel, Restoran, dan Hiburan Kabupaten Sleman	2.030.066.557,00
3.	Setoran pajak Hotel, Restoran, Air Tanah, Sarang Burung Walet, Hiburan, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Kabupaten Bantul	2.603.083.396,00
4.	Setoran pajak Hotel, Restoran, Hiburan, dan Air Tanah Kota Yogyakarta	373.882.359,00
Jumlah		7.653.791.372,00

Pada tahun 2021, nilai OPAD yang terealisasi sebesar Rp1.020.590.971,00 dari target sebesar Rp468.000.000,00 atau tercapai 218,07%. Dibandingkan dengan capaian realisasi tahun 2021, capaian nilai OPAD yang terealisasi tahun 2022 meningkat sebesar 749,94%. Jika dibandingkan dengan target akhir Renstra periode tahun 2020-2024 sebesar Rp1.029.000.000,00 maka realisasi OPAD tahun 2021 telah tercapai sebesar 743,81%.

Perkembangan IKK "Nilai Optimalisasi Penerimaan Negara/Daerah yang Terealisasi" dapat dilihat pada Grafik di bawah ini:



2) IKK: Nilai Efisiensi Pengeluaran Negara dan Daerah

Nilai Efisiensi Pengeluaran Negara Daerah berdasarkan hasil pengawasan Perwakilan BPKP D.I Yogyakarta sebesar Rp134.558.985.969,97

Sampai dengan Triwulan IV tahun 2022, Nilai efisiensi pengeluaran negara/daerah berdasarkan hasil pengawasan Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta Tahun 2022 adalah sebesar Rp134.558.985.969,99 atau mencapai 178,98% (maksimal 120,00%) dari target tahun 2022 sebesar Rp75.181.000.000,00..

Ringkasan nilai efisiensi pengeluaran negara/daerah sebesar Rp134.558.985.969,97 sebagai berikut:

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1.	Nilai efisiensi pengeluaran negara/ daerah dari hasil evaluasi perencanaan dan penganggaran APBD	128.372.764.629,00
2.	Nilai efisiensi pengeluaran negara/ daerah dari hasil Evaluasi BKK Dana Keistimewaan DIY pada Kabupaten/Kota/Kalurahan	2.529.259.876,00
3	Nilai efisiensi pengeluaran negara/ daerah dari hasil Audit Penyesuaian Harga atas Pekerjaan Paket Lot 3	2.601.438.381,88
4	Nilai efisiensi pengeluaran negara/ daerah dari hasil Audit Penyesuaian Harga atas Pekerjaan Paket Lot 5	1.055.523.083,09
Jumlah		134.558.985.969,97

Pada tahun 2021, nilai efisiensi pengeluaran negara/daerah sebesar Rp193.666.276.483,00 dari target sebesar Rp190.506.000.000,00 atau tercapai 101,66%. Dibandingkan dengan capaian realisasi tahun 2021, capaian nilai efisiensi pengeluaran negara/daerah tahun 2022 naik sebesar 72,46%. Jika dibandingkan dengan target akhir renstra periode tahun 2020-2024 sebesar Rp112.939.000.000,00 maka capaian nilai efisiensi pengeluaran negara/daerah tahun 2022 telah tercapai sebesar 119,14%.

Perkembangan IKK "Nilai Efisiensi Pengeluaran Negara/Daerah" dapat dilihat pada Grafik di bawah ini:



3) IKK: Nilai Penyelamatan Keuangan Negara dan Daerah

Nilai Penyelamatan Keuangan Negara berdasarkan hasil pengawasan Perwakilan BPKP D.I Yogyakarta sebesar Rp20.098.818.762,50

Sampai dengan Triwulan IV tahun 2021, realisasi nilai penyelamatan keuangan negara sebesar Rp20.098.818.762,50 atau mencapai 1.717,84% (maksimal 120%) dari target sebesar Rp1.170.000.000,00.

Capaian kinerja tersebut diperoleh dari:

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1.	Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	299.960.000,00
2.	Audit Tujuan Tertentu atas kewajaran harga pengadaan Alat Non Medis dan Alat Medis Habis Pakai (AMHP)	328.116.975,00
3.	Audit Investigatif atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Terkait Kredit Swaguna	18.970.000.000,00
4.	Pengawasan atas Proyek yang dibiayai oleh Pinjaman dan Bantuan Luar Negeri	494.710.260,50
5.	Audit Tujuan Tertentu atas Penggunaan Dana Siap Pakai pada untuk Layanan Isolasi Terpusat COVID-19	6.031.528,00
Jumlah		20.098.818.762,50

Pada tahun 2021, nilai penyelamatan keuangan negara sebesar Rp8.340.796.094,00 dari target sebesar Rp7.126.000.000,00 atau tercapai 117,05%. Dibandingkan dengan capaian realisasi tahun 2021, capaian nilai penyelamatan keuangan negara tahun 2022 naik sebesar 2,95%. Jika

dibandingkan dengan target akhir periode renstra tahun 2020-2024 sebesar Rp103.964.000.000,00 maka capaian nilai optimalisasi penerimaan daerah yang terealisasi telah tercapai sebesar 19,33%.

Perkembangan IKK “Nilai Penyelamatan Keuangan Negara/Daerah” dapat dilihat pada Grafik dibawah ini:



4) IKK: Jumlah Proyek Strategis Nasional (PSN) yang Tercapai Sesuai Target

Jumlah Proyek Strategis Nasional yang Tercapai Sesuai Target sejumlah 2 PSN

Sampai dengan Triwulan IV tahun 2022, realisasi “Jumlah Proyek Strategis Nasional (PSN) yang Tercapai Sesuai Target” sebanyak dua PSN atau tercapai sebesar 100,00% dari target sebanyak dua PSN yaitu:

- PSN Pembangunan Infrastruktur Bandara Udara Internasional Yogyakarta pada PT. Angkasa Pura I (Persero).
Status PSN Pembangunan Infrastruktur Bandara Udara Internasional Yogyakarta pada tahun 2022 adalah selesai konstruksi dan dimanfaatkan tepat waktu sesuai dengan yang direncanakan.
- PSN Pembangunan Kereta Api Akses Bandara Baru Yogyakarta pada Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Wilayah Jawa Bagian Tengah.

Status PSN Pembangunan Kereta Api Akses Bandara Baru Yogyakarta pada Tahun 2022 adalah selesai konstruksi dan dimanfaatkan tepat waktu sesuai dengan yang direncanakan.

Capaian IKK “Jumlah Proyek Strategis Nasional (PSN) yang Tercapai Sesuai Target” sama dengan capaian tahun 2021 sebesar 100,00%. Jika dibandingkan dengan target akhir periode renstra tahun 2020-2024 sebanyak satu PSN maka capaian jumlah PSN yang tercapai sesuai target telah mencapai 200,00%.

Perkembangan IKK “Jumlah Proyek Strategis Nasional yang tercapai sesuai target” dapat dilihat pada Grafik dibawah ini:



5) IKK: Persentase hambatan pelaksanaan pembangunan yang diselesaikan

Persentase Hambatan Pelaksanaan Pembangunan yang Diselesaikan sebesar 100,00%

Sampai dengan Triwulan IV tahun 2022, realisasi “Persentase hambatan pelaksanaan pembangunan yang diselesaikan” sebesar 100,00% atau tercapai sebesar 117,65% dari target sebanyak 85,00%.

Hambatan kelancaran pembangunan (HKP) adalah sebuah kondisi dimana proses pembangunan tidak dapat mencapai *output*, *outcome* dan manfaat yang ditetapkan karena adanya masalah yang tidak dapat diselesaikan dengan menggunakan kewenangan para pihak terkait. IKK Persentase hambatan pelaksanaan pembangunan yang diselesaikan diukur dengan jumlah laporan evaluasi hasil kelancaran pembangun (LEHKP) yang

kesepakatannya terlaksana dibagi dengan total penugasan EHKP yang diterbitkan.

Capaian IKK ini tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun 2021 karena pada tahun 2021 tidak terdapat target. Jika dibandingkan dengan target akhir periode renstra tahun 2020-2024 sebesar 85,00% maka Persentase hambatan pelaksanaan pembangunan yang diselesaikan telah mencapai 117,65%.

Perkembangan IKK "Persentase Hambatan Pelaksanaan Pembangunan yang Diselesaikan" dapat dilihat pada Grafik dibawah ini:



6) IKK: Jumlah Kegiatan Pembangunan Prioritas Daerah yang Diawasi

Jumlah Kegiatan Pembangunan Prioritas Daerah yang Diawasi sebanyak 2 Kegiatan Prioritas Daerah

Sampai dengan Triwulan IV tahun 2022, realisasi "Jumlah Kegiatan Pembangunan Prioritas Daerah yang Diawasi" sebanyak dua kegiatan prioritas daerah atau tercapai 100,00% dari target dua kegiatan prioritas daerah. Realisasi kegiatan prioritas daerah yaitu:

- Pengembangan Kewirausahaan Baru untuk Pemulihan Ekonomi;
- Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Capaian IKK ini tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun 2021 maupun akhir periode Renstra Tahun 2020-2024, dikarenakan target ini baru muncul pada tahun 2022.

Agenda Prioritas Pengawasan Daerah (APPD) tahun 2022 dengan tema "Mengawal Langkah, Membangun Daerah" diterbitkan oleh BPKP sebagai

perwujudan pelaksanaan fungsi pengawasan intern yang profesional, serta *responsive* menjawab kebutuhan daerah.

Pelaksanaan pengawasan intern tentunya harus terus menyesuaikan diri dengan karakteristik lingkungan strategis dan dinamika kebutuhan.

Kegiatan pembangunan prioritas daerah merupakan pengawasan Perwakilan BPKP terhadap Agenda Prioritas Pembangunan Daerah. Hal ini merupakan bentuk kepercayaan Kepala BPKP kepada Perwakilan dalam melakukan pengawasan keuangan dan pembangunan.

Capaian IKK "Jumlah Kegiatan Pembangunan Prioritas Daerah yang Diawasi" dapat dilihat pada Grafik dibawah ini:



7) IKK: Persentase Rekomendasi Strategis yang Ditindaklanjuti

Persentase Rekomendasi Strategis yang Ditindaklanjuti sebesar 81,82 %

Sampai dengan Triwulan IV tahun 2022 realisasi IKK "Persentase Rekomendasi Strategis yang Ditindaklanjuti" sebesar 81,82% atau tercapai 101,25% dari target sebesar 80,00%. Realisasi sebesar 81,82 % dihitung dari jumlah rekomendasi strategis yang terdapat dalam Laporan Gubernur tahun 2021 yang merupakan hasil pengawasan tahun 2021 sejumlah 33 rekomendasi dan telah ditindak lanjuti sebanyak 27 rekomendasi.

Rekomendasi Strategis merupakan rekomendasi hasil pengawasan yang tindak lanjutnya memerlukan adanya keputusan Kepala Perangkat Daerah/Bupati/Walikota/Gubernur/Kepala Badan/ Menteri terhadap suatu permasalahan penting di daerah yang dijumpai dari hasil pengawasan.

Persentase rekomendasi strategis yang ditindaklanjuti diukur dengan jumlah rekomendasi strategis yang ditindaklanjuti dibagi total rekomendasi strategis pada laporan gubernur tahun sebelumnya.

Capaian IKK ini tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun 2021 maupun akhir periode Renstra Tahun 2020-2024, dikarenakan target ini baru muncul pada tahun 2022.

Capaian IKK "Persentase Rekomendasi Strategis yang Ditindaklanjuti" dapat dilihat pada Grafik di bawah ini:



8) IKK: Jumlah BUMN dengan Pengelolaan Korporasinya Baik

Jumlah BUMN dengan Pengelolaan Korporasinya Baik sebanyak 1 BUMN

Sampai dengan Triwulan IV tahun 2022 realisasi IKK "Jumlah BUMN dengan Pengelolaan Korporasinya Baik" sejumlah 1 BUMN atau telah tercapai 100,00% dari target tahun 2022 maupun target akhir Renstra 2020-2024 sejumlah 1 BUMN.

IKK Jumlah BUMN dengan Pengelolaan Korporasinya Baik, pengukurannya dari jumlah BUMN yang tata kelolanya baik dari kegiatan *Assessment Good Corporate Governance*.

Perkembangan IKK "Jumlah BUMN dengan Pengelolaan Korporasinya Baik" dapat dilihat pada Grafik dibawah ini:



Realisasi Jumlah BUMN dengan Pengelolaan Korporasinya Baik berupa hasil *self assessment* PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko (Persero) dengan nilai sebesar 82,34 kategori baik.

9) IKK: Jumlah BUMD dengan Kinerja Sehat

Jumlah BUMD dengan Kinerja Sehat sebanyak 12 BUMD

Sampai dengan Triwulan IV tahun 2022 IKK "Jumlah BUMD dengan Kinerja Sehat" terealisasi sebesar 12 BUMD sebesar 109,09% dari target jumlah BUMD dengan kinerja sehat, sebanyak 11 BUMD.

IKK "Jumlah BUMD dengan Kinerja Sehat" diukur dari jumlah BUMD dengan kinerja sehat dari hasil evaluasi kinerja yang dilakukan oleh BPKP ataupun *assessor* lainnya berdasarkan kriteria penilaian mencapai kategori "Sehat".

Rincian BUMD dengan kinerja sehat sebagai berikut:

No.	Nama BUMD	Skor	Predikat
1.	PT. Taru Martani	75,56	Baik
2.	Perumda Air Minum Tirta Handayani	KemenPUPR: 3,37 Kepmendagri: 64,86	Sehat; Baik
3.	Perumda Air Minum Tirta Binangun	KemenPUPR:3,59 Kepmendagri: 65,25	Sehat; Baik
4.	Perumda Air Minum Tirta Sembada	KemenPUPR:2,99 Kepmendagri: 63,01	Sehat; Baik
5.	Perumda Air Minum Tirtamarta	KemenPUPR:3,25 Kepmendagri: 63,63	Sehat; Baik
6.	Perumda Air Minum Tirta Projotamansari	KemenPUPR:3,80 Kepmendagri: 68,61	Sehat; Baik
7.	Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa	KemenPUPR:3,81 Kepmendagri: 66,95	Sehat; Baik

No.	Nama BUMD	Skor	Predikat
8.	Perumda Air Minum Tirta Wijaya	KemenPUPR:3,40 Kepmendagri: 67,43	Sehat; Baik
9.	Perumda Air Minum Kota Magelang	KemenPUPR:2,87 Kepmendagri: 65,70	Sehat; Baik
10.	Perumda Air Minum Tirta Merapi	KemenPUPR:4,13 Kepmendagri: 72,60	Sehat; Baik
11.	Perumda Air Minum Tirta Gemilang	KemenPUPR:3,60 Kepmendagri: 63,80	Sehat; Baik
12.	Perumda Air Minum Tirta Perwitasari	KemenPUPR:3,49 Kepmendagri: 67,32	Sehat; Baik

Capaian IKU “Jumlah BUMD dengan kinerja sehat” tahun 2022 tetap sama dengan tahun sebelumnya yaitu sebesar 109,09%.

Jika dibandingkan dengan target akhir periode renstra tahun 2020-2024 sebanyak 11 BUMD maka capaian BUMD dengan kinerja sehat telah tercapai 109,09 %.

Perkembangan IKK “Jumlah BUMD dengan Kinerja Sehat” dapat dilihat pada Grafik dibawah ini:



10) IKK: Jumlah BLUD dengan Kinerja Sehat.

Jumlah BLUD dengan Kinerja Sehat sebanyak 2 BLUD

Sampai dengan Triwulan IV tahun 2022 IKK “Jumlah BLUD dengan Kinerja Sehat” terealisasi sebanyak dua BLUD atau telah tercapai 200,00% (maksimal 120,00%) dari target tahun 2022 sebanyak satu BLUD. Dua BLUD dengan kinerja sehat yaitu

RSUD dr. Soedirman Kabupaten Kebumen (nilai 70,50 kategori sehat) dan RSUD Dr. Tjitrowardoyo Kabupaten Purworejo (nilai 72,09 kategori sehat).

IKK "Jumlah BLUD dengan Kinerja Sehat" diukur dari jumlah BLUD dengan kinerja sehat dari hasil evaluasi kinerja yang dilakukan oleh BPKP ataupun *assessor* lainnya berdasarkan kriteria penilaian mencapai kategori "Sehat".

Capaian IKK Jumlah BLUD dengan kinerja sehat tahun 2022 sama dengan capaian tahun 2021 yaitu sebesar 100,00%. Jika dibandingkan dengan target akhir renstra tahun 2020 - 2024 telah tercapai 100% atau telah terealisasi dua BLUD.

Perkembangan IKK "Jumlah BLUD dengan Kinerja Sehat" dapat dilihat pada Grafik dibawah ini:



11) IKK: Jumlah BUMDes yang Mampu Menyusun Laporan

Jumlah BUMDes yang Mampu Menyusun Laporan sebanyak 36 BUMDes

Sampai dengan Triwulan IV tahun 2022 IKK " Jumlah BUMDes yang Mampu Menyusun Laporan " telah terealisasi sebanyak 36 BUMDes atau atau sebesar 120,00% dari target jumlah BUMDes yang mampu menyusun laporan sebanyak 30 BUMDes.

BUMDes yang mampu menyusun laporan adalah BUMDes yang mampu menyusun laporan keuangan setelah adanya kegiatan pendampingan penyusunan laporan keuangan dari BPKP.

Dibandingkan dengan capaian tahun 2021 sebesar 650,00% (78 BUMDes dari target 12 BUMDes), Jumlah BUMDes yang mampu menyusun laporan keuangan turun sebesar 530,00%. Jika dibandingkan dengan target akhir periode renstra tahun 2020 - 2024 sebanyak 26 BUMDes telah tercapai 138,46%.

Realisasi sebanyak 36 BUMDes terdiri dari BUMDes di Kabupaten Gunungkidul sebanyak 11 BUMDes, Kabupaten Kebumen sebanyak 17 BUMDes dan Kabupaten Kulon Progo sebanyak 8 BUMDes.

Perkembangan IKK “Jumlah BUMDes yang mampu menyusun laporan keuangan” dapat dilihat pada Grafik dibawah ini:



12) IKK: Jumlah BUMDes yang Memberikan Kontribusi Pada Perekonomian Desa

Jumlah BUMDes yang Memberikan Kontribusi pada Perekonomian Desa sebanyak 3 BUMDes

Sampai dengan Triwulan IV tahun 2022 IKK “ Jumlah BUMDes yang Memberikan Kontribusi Pada Perekonomian Desa ” sebesar 150,00% (maksimal 120,00%) dari target jumlah BUMDes yang memberikan kontribusi pada perekonomian desa sebanyak 2 BUMDes.

Pendirian BUMDes diharapkan dapat meningkatkan perekonomian desa melalui berbagai kegiatan usaha untuk kesejahteraan seluruh masyarakat desa. BUMDes dapat memberikan kontribusi pada perekonomian desa dengan peningkatan pendapatan asli daerah desa (PADses), membuka lapangan pekerjaan sesuai dengan potensi desa dan sebagainya.

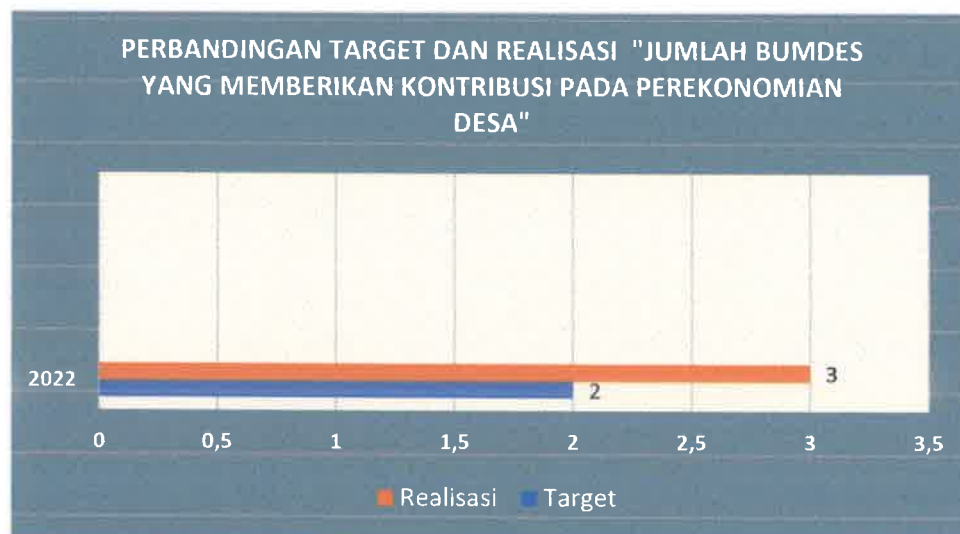
BUMDes yang memberikan kontribusi pada perekonomian desa diukur dengan menghitung jumlah BUMDes yang mampu memberikan kontribusi pada perekonomian desa pada tahun yang bersangkutan.

Rincian BUMDes yang memberikan kontribusi pada perekonomian desa yaitu:

1. BUMDesa Binangun Sindutan
2. BUMDesa Binangun Lancar
3. BUMDesa Binangun Dina Karya Kaligintung.

Capaian IKK ini tidak dapat dibandingkan dengan capain tahun 2021 maupun akhir periode renstra tahun 2020-2024, dikarenakan target ini baru muncul pada tahun 2022.

Capaian IKK "Jumlah BUMDes yang Memberikan Kontribusi pada Perekonomian Desa" dapat dilihat pada grafik dibawah ini:



13) IKK: Jumlah BUMD dengan pengelolaan korporasinya baik

Jumlah BUMD dengan Pengelolaan Korporasinya Baik sebanyak 1 BUMD

Sampai dengan Triwulan IV tahun 2022 IKK " Jumlah BUMD dengan pengelolaan korporasinya baik " sebanyak satu BUMD atau tercapai sebesar 100,00 dari target tahun 2022 sebanyak satu BUMD. Realisasi BUMD dengan pengelolaan korporasinya baik yaitu PDAM Tirtamarta Kota Yogyakarta.

BUMD dengan tata kelola korporasi baik adalah BUMD yang memperoleh predikat penerapan GCG baik.

Capaian IKK ini tidak dapat dibandingkan dengan capain tahun 2021 karena pada tahun 2021 tidak ada target. Jika dibandingkan dengan akhir periode renstra tahun 2020-2024 telah tercapai 50,00% dari target sebesar 2 BUMD.

Perkembangan IKK “Jumlah BUMD dengan Pengelolaan Korporasinya Baik” dapat dilihat pada Grafik dibawah ini:



14) IKK: Presentase Hasil Pengawasan Represif yang Dimanfaatkan/Ditindaklanjuti

Persentase hasil pengawasan represif yang dimanfaatkan/ditindaklanjuti 100%

Sampai dengan Triwulan IV tahun 2022 IKK “Presentase Hasil Pengawasan Represif yang Dimanfaatkan/Ditindaklanjuti” telah terealisasi sebesar 100% dari target sebesar 100% pada tahun 2022. Capaian kinerja tahun 2022 sama dengan capaian kinerja tahun 2021 yaitu telah tercapai 100%. Capaian kinerja tahun 2022 jika dibandingkan dengan target akhir periode renstra tahun 2020 -2024 telah tercapai 100%.

Pengawasan BPKP bidang investigasi yang bersifat represif dalam konteks untuk pengendalian korupsi meliputi pelaksanaan audit investigatif, audit penghitungan kerugian keuangan negara (PKKN), pemberian keterangan ahli, dan audit dengan tujuan tertentu lainnya bidang investigasi.

Yang dimaksud K/L/P/BU menindaklanjuti hasil pengawasan represif dalam indikator ini adalah K/L/P/BU dan atau instansi penegak hukum (Aparat Penegak Hukum/APH) yang meminta penugasan telah menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan sebagaimana tertuang di dalam laporan hasil audit.

Dalam hal penerimaan penugasan bersumber dari APH, tindak lanjut dimaksud adalah digunakannya laporan hasil audit tersebut sebagai bahan untuk melakukan tindakan penyidikan dan atau kegiatan penuntutan suatu kasus tindak pidana korupsi. Dalam hal penerimaan penugasan bersumber dari K/L/P/BU, tindak lanjut dimaksud adalah tindakan korektif dan/atau tindak

lanjut penegakan hukum sebagaimana dinyatakan dalam rekomendasi hasil audit.

Pelaksanaan tindak lanjut atas kegiatan yang bersifat represif oleh APH dilakukan dalam kurun waktu yang cukup lama bahkan melewati satu tahun anggaran dari saat rekomendasi dalam hasil audit.

Pencapaian sasaran kegiatan ini diukur dengan menghitung hasil pengawasan represif yang dimanfaatkan/ditindaklanjuti di tahun 2022 dibandingkan dengan penugasan represif tahun 2021.

Tindak lanjut hasil pengawasan yang diukur dalam indikator ini adalah tindak lanjut kegiatan pengawasan atas penugasan tahun 2021 yang dilakukan pada tahun 2022, yaitu sebanyak 3 (tiga) tindak lanjut dari 3 (tiga) penugasan, sehingga tercapai 100%.

Capaian tersebut merupakan tiga audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dan seluruhnya telah ditindaklanjuti dengan Pemberian Keterangan Ahli (PKA) di hadapan penyidik.

Perkembangan IKK "Persentase Hasil Pengawasan Represif yang Dimanfaatkan/Ditindaklanjuti" dapat dilihat pada Grafik dibawah ini:



15) IKK: Persentase Hasil Pengawasan Preventif dan Edukatif yang Dimanfaatkan/ Ditindaklanjuti

Persentase hasil pengawasan preventif dan edukatif yang dimanfaatkan/ditindaklanjuti 100,00%

Sampai dengan Triwulan IV tahun 2022 IKK: Persentase Hasil Pengawasan Preventif dan Edukatif yang Dimanfaatkan/ Ditindaklanjuti terealisasi sebesar 100,00%

atau tercapai telah tercapai 125,00% (maksimal 120,00%) dari target tahun 2022 sebanyak 80,00%.

Tiga strategi dalam upaya pencegahan dan pengendalian korupsi meliputi edukatif, preventif dan represif. Strategi edukatif bertujuan menciptakan sumber daya manusia yang memiliki pemahaman, perilaku serta budaya anti korupsi melalui proses pembelajaran informal yang terstruktur, yang dilaksanakan melalui pembentukan Masyarakat Pembelajar Anti Korupsi (MPAK) dan Sosialisasi Anti Korupsi (Sospak).

Strategi preventif bertujuan mencegah terjadinya korupsi melalui penerapan sistem yang mampu mengendalikan korupsi melalui *Fraud Control Plan (FCP)* dan *Fraud Risk Assessment (FRA)*. Sistem diibaratkan sebagai lingkungan yang memiliki daya cegah bagi individu yang memiliki motivasi bertindak koruptif. Berbagai atribut dalam FCP dirancang untuk mewujudkan lingkungan yang anti korupsi tersebut.

Pencapaian sasaran kegiatan ini diukur dengan menghitung hasil pengawasan edukatif dan preventif yang dimanfaatkan/ ditindaklanjuti dengan penugasan pengawasan preventif/edukatif yang telah dilaksanakan.

Tahun 2021 realisasi capaian kinerja sebesar 100% dari target 75% atau tercapai 133,33% (maksimal 120,00%). Realisasi capaian kinerja tahun 2022 sebesar 120% adalah sama jika dibandingkan dengan tahun 2021. Jika dibandingkan dengan target akhir periode renstra tahun 2020 – 2024 telah tercapai 111,11% dari target 90,00%.

Capaian kinerja tersebut didukung dengan pemanfaatan hasil pengawasan edukatif dan preventif berupa penyusunan profil risiko yang seluruhnya telah dimanfaatkan untuk pengendalian kecurangan.

Perkembangan IKK “Persentase Hasil Pengawasan Preventif dan Edukatif yang Dimanfaatkan/Ditindaklanjuti” dapat dilihat pada Grafik dibawah ini:



16) IKK: Jumlah Pemda dengan Efektivitas Pengendalian Korupsi Baik

Jumlah Pemda dengan Efektivitas Pengendalian Korupsi Baik sebanyak 8 Pemda

Sampai dengan Triwulan IV tahun 2022 Realisasi capaian IKK "Jumlah Pemda dengan EPK Baik" tahun 2022 sejumlah 8 (delapan) pemda atau tercapai 266,67% (maksimal 120,00% dari target 3 (tiga) pemda. Pemda dengan

efektivitas pengendalian korupsi baik yaitu:

No	Nama Pemda	SKOR IEPK
1	D.I. Yogyakarta	3,26
2	Kabupaten Sleman	3,09
3	Kabupaten Gunungkidul	3,00
4	Kabupaten Klaten	3,00
5	Kabupaten Magelang	3,00
6	Kota Magelang	3,00
7	Kabupaten Purworejo	3,00
8	Kabupaten Cilacap	3,08

Berawal dari tiga strategi dalam upaya pencegahan dan pengendalian korupsi meliputi edukatif, preventif dan represif, termasuk yang dilakukan oleh lembaga di luar BPKP sepertinya belum terintegrasi dan terukur. Tidak diketahui sampai seberapa jauh kemajuannya dalam kerangka pengelolaan risiko korupsi.

Rerangka pengukuran diperlukan untuk itu dengan fungsi utama memberikan landasan bagi penyusunan peta jalan untuk peningkatan efektivitas strategi.

Pengembangan model pengukuran indeks EPK oleh BPKP dilakukan untuk memberikan landasan agar ketiga pilar strategi pengendalian korupsi oleh instansi dapat dilaksanakan lebih terukur dan terintegrasi dalam perspektif FRM dan GRC (*fraud risk management* dan *governance-risk-control*).

Model pengukuran IEPK mengintegrasikan semua upaya manajemen risiko korupsi, sekaligus meyakini bahwa upaya tersebut benar-benar berkontribusi terhadap pencapaian kinerja organisasi ataupun penyelenggaraan program pembangunan yang dimandatkan kepada organisasi.

Pencapaian sasaran kegiatan ini diukur dengan menghitung skor indeks efektivitas pengendalian korupsi yang merupakan komposit skor atas tiga pilar: kapabilitas pengelolaan risiko korupsi, penerapan strategi pencegahan, dan penanganan kejadian korupsi dengan minimal 3,00.

Realisasi capaian kinerja tahun 2022 tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2021 karena pada tahun 2021 tidak ada target, karena IKK ini baru muncul pada tahun 2022. Jika dibandingkan dengan target akhir renstra tahun 2020-2024 telah tercapai 100,00% dari target sebesar 8 pemda.

Perkembangan IKK “Jumlah Pemda dengan Efektivitas Pengendalian Korupsi Baik” dapat dilihat pada Grafik dibawah ini:



17) IKK: Jumlah Pemda menindaklanjuti *Area Of Improvement* dari hasil pengukuran EPK

Jumlah Pemda Menindaklanjuti *Area Of Improvement* dari hasil Pengukuran EPK sebanyak 11 Pemda

Sampai dengan Triwulan IV tahun 2022 realisasi capaian IKK “Jumlah Pemda Menindaklanjuti *Area of Improvement* dari Hasil Pengukuran EPK” tahun 2022 sejumlah 11 (sebelas) Pemda atau tercapai 550,00% (maksimal 120,00%) dari target 2 (dua) Pemda.

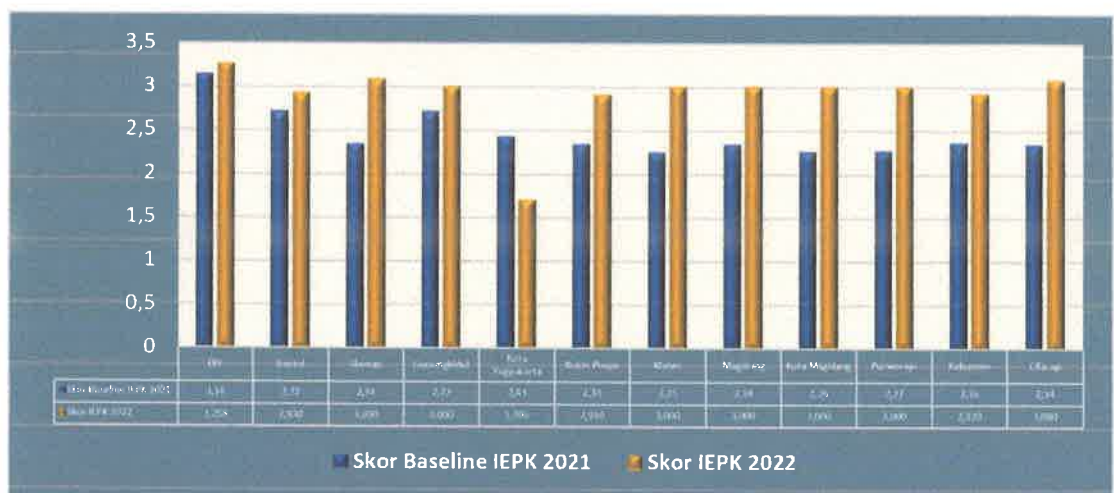
Penilaian IEPK akan mengidentifikasi kelemahan-kelemahan pengendalian yang menjadi area perbaikan *Area of Improvement (Aoi)*.

Pencapaian sasaran kegiatan ini diukur dengan menghitung jumlah pemda yang menindaklanjuti Aoi atas hasil pengukuran EPK pada tahun sebelumnya.

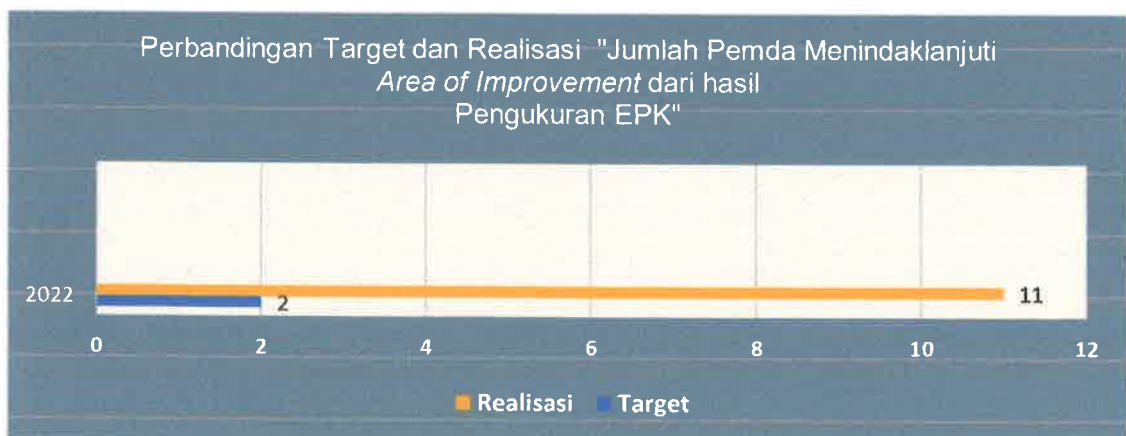
Realisasi capaian kinerja tahun 2022 tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2021 maupun akhir renstra tahun 2020-2024 karena merupakan IKK yang baru muncul di tahun 2022.

Berdasarkan Hasil Pengawasan atas Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penilaian Mandiri dan Penjaminan Kualitas Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi khususnya atas Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) tahun 2022 pada 12 (dua belas) Pemerintah Daerah di wilayah kerja Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta, sebanyak 11 (sebelas) Pemerintah Daerah telah menindaklanjuti *AoI* sesuai hasil *Baseline* Penilaian IEPK tahun 2021. Terdapat satu Pemerintah Daerah yang mengalami penurunan nilai IEPK disebabkan penalti atas Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap mantan Walikota Yogyakarta atas kasus perijinan pendirian apartemen di Kota Yogyakarta.

Skor *Baseline* IEPK Tahun 2021 dan Skor IEPK Tahun 2022



Capaian IKK "Jumlah Pemda Menindaklanjuti *Area of Improvement* dari Hasil Pengukuran EPK" dapat dilihat pada grafik dibawah ini:



18) IKK: Jumlah APIP Provinsi dengan Kapabilitas APIP \geq Level 3

Jumlah APIP Provinsi dengan Kapabilitas APIP \geq Level 3 sebanyak 1 Provinsi

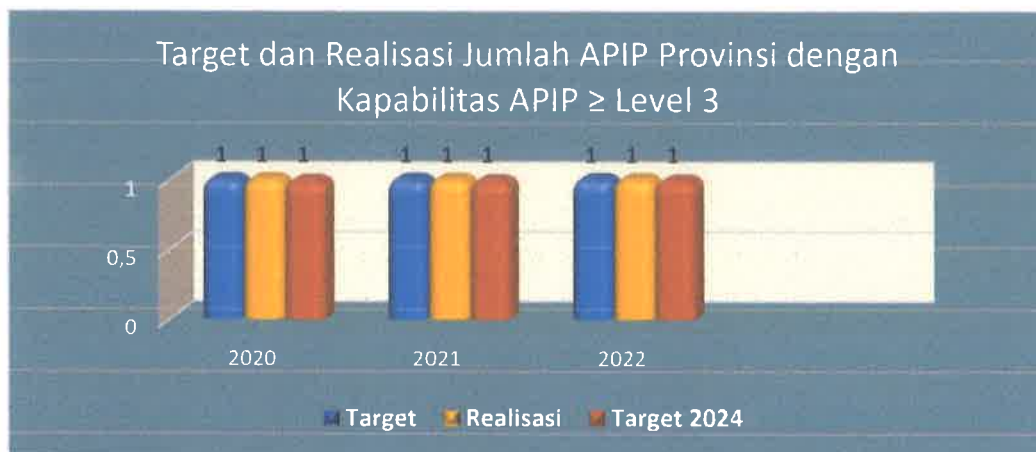
Sampai dengan Triwulan IV tahun 2022 “Jumlah APIP Provinsi dengan Kapabilitas APIP \geq Level 3” telah mencapai 100,00% dari target tahun 2022 sebanyak satu Provinsi. Realisasi tersebut didukung dengan hasil evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP pada Inspektorat Daerah D.I. Yogyakarta tahun 2022 dengan skor nilai sebesar 3,25.

Realisasi Jumlah APIP Provinsi dengan Kapabilitas APIP \geq Level 3 tahun 2022 tetap sama dibandingkan dengan capaian tahun 2021 sebesar 100%.

Hal ini menunjukkan bahwa kinerja tahun 2022 harus dipertahankan dan kerjasama dengan Inspektorat Daerah D.I. Yogyakarta sebagai mitra Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta harus dijaga agar tetap kondusif.

Jika dibandingkan dengan target periode akhir renstra tahun 2020 – 2024 telah tercapai 100%.

Perkembangan IKK “Jumlah APIP Provinsi dengan Kapabilitas APIP \geq Level 3” dapat dilihat pada Grafik dibawah ini:



19) IKK: Jumlah APIP Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas APIP \geq Level 3

Jumlah APIP Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas APIP \geq Level 3 sebanyak 11 Kabupaten/Kota

Sampai dengan Triwulan IV tahun 2022 “Jumlah APIP Kabupaten/Kota Kapabilitas APIP \geq Level 3” telah mencapai 122,22% (maksimal 120,00%) dari target tahun 2022 sebanyak 9 kabupaten/kota.

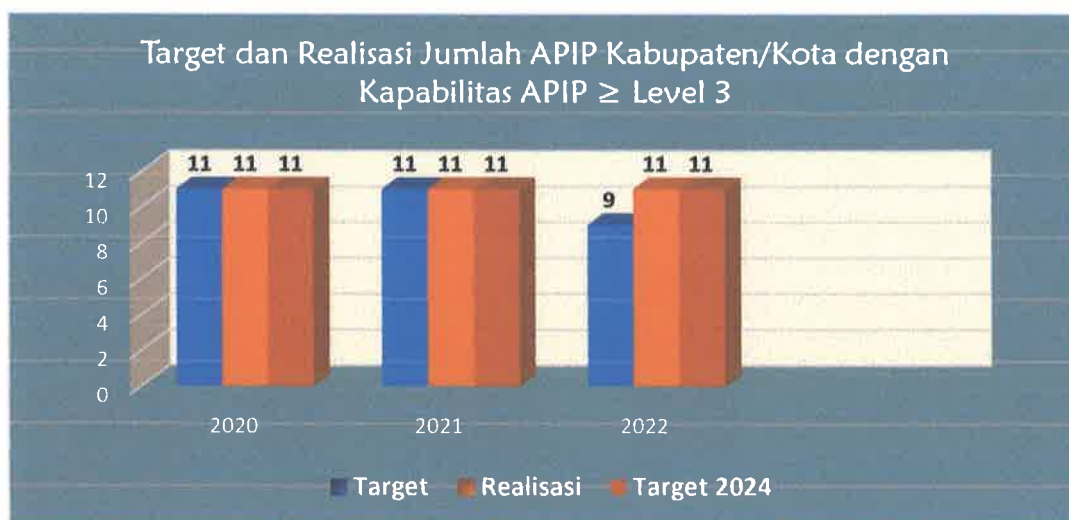
Realisasi tersebut didukung dengan hasil evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP pada Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota tahun 2022 di seluruh wilayah kerja Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta dengan rincian skor sebagai berikut:

No	Nama APIP	Level	Skor
1	Inspektorat Kabupaten Sleman	L3	3,030
2	Inspektorat Kabupaten Purworejo	L3	3,000
3	Inspektorat Kabupaten Kulon Progo	L3	3,085
4	Inspektorat Kabupaten Cilacap	L3	3,000
5	Inspektorat Kabupaten Magelang	L3	3,000
6	Inspektorat Kabupaten Gunungkidul	L3	3,100
7	Inspektorat Kota Yogyakarta	L3	3,000
8	Inspektorat Kabupaten Bantul	L3	3,050
9	Inspektorat Kota Magelang	L3	3,000
10	Inspektorat Kabupaten Klaten	L3	3,170
11	Inspektorat Kabupaten Kebumen	L3	3,120

Capaian Jumlah APIP Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas APIP \geq Level 3 tahun 2022 sebanyak 120,00% naik 20,00% dibandingkan dengan capaian tahun 2021 sebesar 100%. Hal ini disebabkan pada Tahun 2022 terdapat penurunan target dari target awal 11 APIP setelah revisi menjadi 9 APIP.

Jika dibandingkan dengan target periode akhir renstra tahun 2020 – 2024 telah tercapai 100% dari target sebanyak 11 APIP.

Perkembangan IKK “Jumlah APIP Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas APIP \geq Level 3” dapat dilihat pada Grafik dibawah ini:



20) IKK: Jumlah Provinsi dengan Maturitas SPIP \geq Level 3

Jumlah Provinsi dengan Maturitas SPIP \geq Level 3 sebanyak 1 Provinsi

Sampai dengan Triwulan IV tahun 2022 telah mencapai 100,00% dari target tahun 2022 sebanyak satu Provinsi.

Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi adalah tingkat kematangan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian yang

meliputi kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Indikator ini mengukur tingkat kematangan penyelenggaraan SPIP pada Provinsi, serta mengidentifikasi area-area penyelenggaraan SPIP yang masih memerlukan perbaikan.

Jumlah Provinsi dengan Maturitas SPIP \geq Level 3 diukur dengan menghitung jumlah Provinsi di wilayah kerja Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta yang telah memenuhi maturitas penyelenggaraan SPIP \geq Level 3.

Jika dibandingkan dengan target kinerja akhir Renstra periode tahun 2020–2024 yang terdiri atas 12 Pemda di wilayah kerja Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta termasuk 1 Provinsi, telah tercapai 100,00%.

Perkembangan IKK “Jumlah Provinsi dengan Maturitas SPIP \geq Level 3” dapat dilihat pada Grafik dibawah ini:



21) IKK: Jumlah Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPIP \geq Level 3

Jumlah Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPIP \geq Level 3 sebanyak 10 Kabupaten/Kota

Sampai dengan Triwulan Realisasi IV tahun 2022 IKK Jumlah Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPIP \geq Level 3 adalah sebanyak 10 Kab/Kota atau tercapai 100% dari target sebesar 10 Kab/Kota.

Indikator ini mengukur tingkat kematangan penyelenggaraan SPIP pada Kabupaten/Kota, serta mengidentifikasi area-area penyelenggaraan SPIP yang masih memerlukan perbaikan.

Jumlah Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPIP \geq Level diukur dengan menghitung jumlah Kabupaten/Kota di wilayah kerja Perwakilan BPKP D.I.

Yogyakarta yang telah memenuhi maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi \geq Level 3.

Realisasi jumlah Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPIP \geq Level 3 yaitu:

No	Kabupaten/Kota	Level	Skor
1	Kabupaten Sleman	L3	3,390
2	Kabupaten Bantul	L3	3,112
3	Kabupaten Gunungkidul	L3	3,013
4	Kabupaten Kulon Progo	L3	3,095
5	Kabupaten Klaten	L3	3,045
6	Kabupaten Magelang	L3	3,160
7	Kota Magelang	L3	3,189
8	Kabupaten Purworejo	L3	3,014
9	Kabupaten Cilacap	L3	3,217
10	Kabupaten Kebumen	L3	3,133

Jika dibandingkan dengan target kinerja akhir Renstra periode tahun 2020 – 2024 yang terdiri atas 11 Pemda Kabupaten/Kota di wilayah kerja Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta, telah tercapai 90,91%.

Perkembangan IKK “Jumlah Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPIP \geq Level 3” dapat dilihat pada Grafik dibawah ini:



22) IKK: Jumlah Provinsi dengan MRI \geq Level 3

Jumlah Provinsi dengan MRI \geq Level 3 sebanyak 1 Provinsi

Sampai dengan Triwulan IV tahun 2022, realisasi IKK Jumlah Provinsi dengan MRI \geq Level 3 adalah sebanyak 1 Provinsi atau tercapai 100,00% dari target sebesar 1 Provinsi. Capaian tersebut yaitu Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta dengan hasil skor penilaian MRI sebesar 3,260.

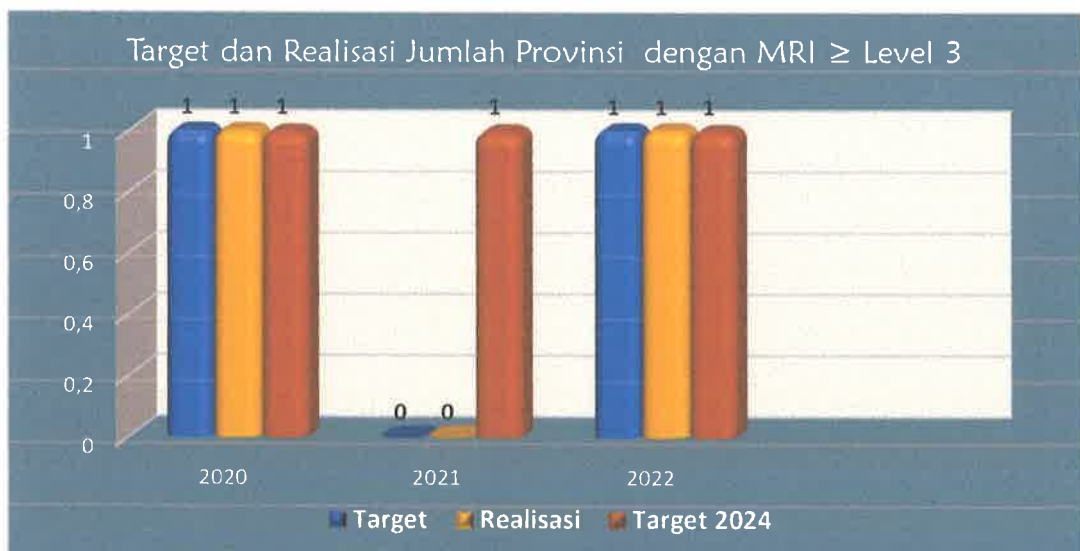
Manajemen Risiko Indeks (MRI) adalah indeks yang menggambarkan kualitas penerapan manajemen risiko di lingkungan Pemerintah Daerah yang diperoleh dari perhitungan parameter penilaian pengelolaan risiko.

Indikator ini mengukur kualitas penerapan manajemen risiko pada Provinsi, serta mengidentifikasi area-area yang masih memerlukan perbaikan.

Jumlah Provinsi dengan MRI \geq Level 3 diukur dengan jumlah provinsi yang memperoleh capaian MRI \geq Level 3.

Capaian tahun 2022 sebesar 100,00% tidak dapat dibandingkan dengan Tahun 2021, karena tahun 2021 tidak ada target. Jika dibandingkan dengan target kinerja akhir Renstra periode tahun 2020–2024 sebesar 1 Provinsi, telah tercapai 100,00%.

Perkembangan IKK “Jumlah Provinsi dengan MRI \geq Level 3” dapat dilihat pada Grafik dibawah ini:



23) IKK: Jumlah Kabupaten/Kota dengan MRI \geq Level 3

Jumlah Kabupaten/Kota dengan MRI \geq Level 3 sebanyak 7 Kabupaten/Kota

Sampai dengan Triwulan IV tahun 2022, realisasi IKK Jumlah Kabupaten/Kota dengan MRI \geq Level 3 adalah sebanyak tujuh Kabupaten/Kota atau tercapai 233,33% (nilai maksimal 120,00%) dari target sebesar 3 Kabupaten/Kota.

Jumlah kabupaten/kota dengan MRI \geq Level 3 diukur dengan jumlah kabupaten/kota yang memperoleh capaian MRI \geq Level 3.

Realisasi jumlah Kabupaten/Kota dengan MRI \geq Level 3 yaitu:

No	Kabupaten/Kota	Level	Skor
1	Kabupaten Sleman	L3	3,081
2	Kabupaten Bantul	L3	3,010
3	Kabupaten Gunungkidul	L3	3,010
4	Kabupaten Klaten	L3	3,000
5	Kabupaten Magelang	L3	3,031
6	Kabupaten Purworejo	L3	3,000
7	Kabupaten Cilacap	L3	3,031

Tahun 2021 tidak ada capaian atau 0,00% dari target sebanyak 2 pemda. Realisasi capaian kinerja tahun 2022 meningkat 120,00% jika dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar 0,00%. Jika dibandingkan dengan target kinerja akhir renstra periode Tahun 2020–2024 sebesar 8 Kabupaten/Kota, telah tercapai 87,50%.

Perkembangan IKK “Jumlah Kabupaten/Kota dengan MRI \geq Level 3” dapat dilihat pada Grafik dibawah ini:



24) IKK: Jumlah Pemda yang Akuntabel dalam Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Daerah

Jumlah Pemda yang akuntabel dalam Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Daerah sebanyak 7 pemda

Sampai dengan Triwulan IV tahun 2022 realisasi jumlah pemda yang akuntabel dalam pengelolaan keuangan dan kinerja adalah sebanyak 7 (tujuh) pemda atau mencapai 116,67% dari target tahun 2022 sebesar 6 (enam) pemda.

Pemda yang akuntabel (efisien dan efektif) dalam pengelolaan keuangan dan kinerja tercermin dari Opini LKPD WTP dan nilai evaluasi SAKIP minimal BB.

Capaian Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2021 dan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) tahun 2021 disajikan pada berikut:

No	Pemerintah Daerah	Capaian Opini LKPD	Evaluasi SAKIP
1	Provinsi D.I Yogyakarta	WTP	AA
2	Kabupaten Bantul	WTP	A
3	Kabupaten Sleman	WTP	A
4	Kabupaten Kulon Progo	WTP	A
5	Kabupaten Gunung Kidul	WTP	BB
6	Kabupaten Cilacap	WTP	BB
7	Kota Yogyakarta	WTP	A

Capaian tahun 2022 sama dengan tahun 2021. Capaian persentase jumlah Pemda yang akuntabel dalam pengelolaan keuangan dan kinerja daerah sesuai renstra 2020-2024 diukur berdasarkan persentase jumlah pemda dengan Opini LKPD WTP dan nilai evaluasi SAKIP minimal BB dibandingkan dengan jumlah Pemda di seluruh Indonesia (548 pemda).

Tahun 2022 persentase jumlah Pemda yang akuntabel dalam pengelolaan keuangan dan kinerja daerah sebesar 1,28% (7 pemda) dari jumlah Pemda di seluruh Indonesia. Adapun jika dibandingkan dengan target akhir periode renstra tahun 2020-2024 telah tercapai sebesar 77,78% dari target sebesar 1,66% (9 pemda).

Perkembangan IKK "Jumlah Pemda yang Akuntabel dalam Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Daerah" dapat dilihat pada Grafik dibawah ini:



25) IKK: Jumlah Desa yang Pengelolaan Keuangannya Akuntabel

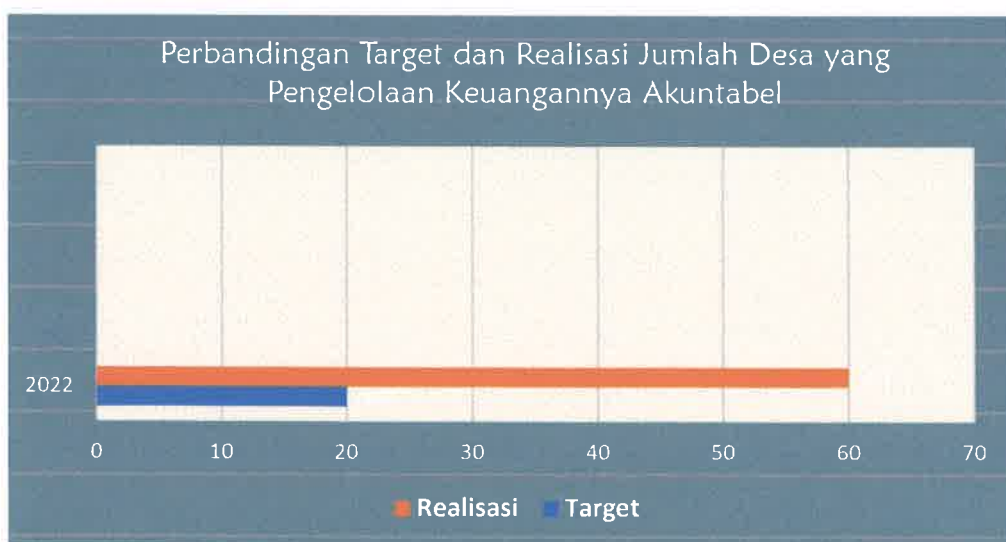
Jumlah Desa yang Pengelolaan Keuangannya Akuntabel sebanyak 60 desa

Sampai dengan Triwulan IV tahun 2022 berdasarkan hasil pengawasan BPKP tahun 2022, realisasi jumlah desa yang pengelolaan keuangannya akuntabel sebanyak 60 desa dari 20 desa yang ditargetkan atau tercapai 300,00% (maksimal 120,00%). IKK ini tidak dapat dibandingkan dengan capaian

tahun 2021 dan target akhir renstra tahun 2020-2024, karena merupakan IKK yang baru muncul di tahun 2022.

Jumlah Desa yang Pengelolaan Keuangannya Akuntabel diukur dengan menghitung Jumlah Desa yang Pengelolaan Keuangannya Akuntabel.

Perbandingan target dan realisasi IKK "Jumlah Desa yang Pengelolaannya Akuntabel" dapat dilihat pada grafik di bawah ini:



26) IKK: Jumlah Desa yang Menerapkan Pengelolaan Aset Desa Secara Memadai

Jumlah Desa yang menerapkan pengelolaan aset desa secara memadai sebanyak 246 Desa

Sampai dengan Triwulan IV tahun 2022 Jumlah desa yang menerapkan pengelolaan aset desa secara memadai berdasarkan hasil pengawasan BPKP secara kumulatif sejumlah 246 desa atau mencapai 1.230,00% (nilai maksimal 120%) dari target tahun 2022 sejumlah 20 desa sebagai

berikut:

No	Kabupaten	Jumlah Desa
Tahun 2022		
1	Kabupaten Gunungkidul	120 Desa
2	Kabupaten Kebumen	107 Desa
	Jumlah Tahun 2022	227 Desa
Tahun 2021		
1	Kabupaten Kulon Progo	8 Desa
2	Kabupaten Sleman	11 Desa
	Jumlah Tahun 2021 dan 2022	246 Desa

Jumlah desa yang menerapkan pengelolaan aset desa secara memadai diukur dengan menghitung jumlah desa yang telah menerapkan pengelolaan aset desa sesuai ketentuan berdasarkan pengujian atas pengendalian intern tata kelola aset desa.

Tahun 2021 Jumlah desa yang menerapkan pengelolaan aset desa secara memadai berdasarkan hasil pengawasan BPKP tahun 2021 adalah sejumlah 40 desa atau mencapai 571,43% (nilai maksimal 120%) dari target tahun 2021 sejumlah 7 desa. Realisasi capaian kinerja tahun 2022 sebesar 1.230,00% dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar 571,43%, mengalami kenaikan sebesar 658,57%. Adapun jika dibandingkan dengan target akhir periode renstra tahun 2020 – 2024 sejumlah 511 desa yang menerapkan pengelolaan aset desa memadai, maka realisasi tahun 2022 telah tercapai 48,14%.

Perkembangan IKK “Jumlah Desa yang Menerapkan Aset Desa Secara Memadai” dapat dilihat pada Grafik dibawah ini:



27) IKK: Jumlah BLUD dengan MRI \geq Level 3

Jumlah BLUD dengan MRI \geq Level 3 sebanyak 4 BLUD

Sampai dengan Triwulan IV tahun 2022 realisasi Jumlah BLUD dengan MRI \geq Level 3 adalah sebanyak 4 BLUD atau tercapai 100% dari target 4 BLUD. Realisasi BLUD dengan MRI \geq level 3 yaitu:

- RSUD Wates Kabupaten Kulon Progo
- RSUD Prambanan Kabupaten Sleman
- RSUD Kota Yogyakarta
- Rumah Sakit Jiwa Grhasia Daerah Istimewa Yogyakarta.

Manajemen Risiko Indeks (MRI) BLUD merupakan suatu model yang memuat karakteristik dasar dan tingkat kematangan pengelolaan risiko di suatu pada Badan Layanan Umum Daerah. Pengelolaan risiko di BLUD harus dikelola secara memadai. Pengidentifikasian dan penganalisisan risiko yang tepat atas tujuan/sasaran yang ditetapkan dengan melakukan identifikasi kejadian potensial yang dapat mempengaruhi entitas, mengidentifikasi proses bisnis, serta merumuskan kriteria dampak dan frekuensi peristiwa risiko untuk mengungkapkan dan menilai sifat dan kompleksitas dari risiko. Respon terhadap risiko yang terukur akan membantu manajemen dalam merumuskan strategi, kebijakan, serta pengambilan keputusan yang efektif dan efisien dalam mencapai tujuan organisasi.

Dibandingkan dengan capaian tahun 2021 sebanyak 0 BLUD, Jumlah BLUD dengan MRI \geq level 3 naik sebesar 100%. Jika dibandingkan dengan target akhir periode renstra tahun 2020 - 2024 sebanyak 7 BLUD telah tercapai sebesar 57,14%.

Perkembangan IKU "Jumlah BLUD dengan MRI \geq Level 3" dapat dilihat pada Grafik dibawah ini.



28) IKK: Jumlah BUMD dengan Kapabilitas SPI \geq Level 3

Jumlah BUMD dengan Kapabilitas SPI \geq Level 3 sebanyak 1 BUMD

Sampai dengan Triwulan IV tahun 2022 realisasi IKK Jumlah BUMD dengan kapabilitas SPI \geq Level 3 tahun 2022 adalah sebanyak 1 BUMD atau tercapai 100% dari target 1 BUMD. Realisasi BUMD dengan kapabilitas SPI \geq Level 3 yaitu Perumda Air Minum Tirta Binangun Kabupaten Kulon Progo.

Kapabilitas Satuan Pengawasan Intern (SPI) BUMD merupakan suatu model yang memuat karakteristik dasar dan tingkat kapabilitas SPI pada Badan Usaha Milik Daerah. Peran kelembagaan satuan pengawasan intern, hambatan penataan dan pelaksanaan peran satuan pengawasan internal (SPI), serta tingkat kapabilitas SPI yang terukur akan membantu manajemen dalam merumuskan strategi, kebijakan, serta pengambilan keputusan yang efektif dan efisien dalam mencapai tujuan organisasi.

Kapabilitas SPI \geq Level 3 diperoleh jika SPI mampu memberikan *assurance* secara keseluruhan atas tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern.

Capaian tahun 2022 tidak dapat diperbandingkan dengan capaian tahun 2021 karena pada tahun 2021 tidak ada target.

Jika dibandingkan dengan target akhir periode renstra tahun 2020 - 2024 sebanyak 2 BUMD, telah tercapai 50,00%.

Perkembangan IKK "Jumlah BUMD dengan Kapabilitas SPI \geq Level 3" dapat dilihat pada Grafik dibawah ini.



29) IKK: Jumlah BLU/D dengan Kapabilitas SPI \geq Level 3

Jumlah BLU/D dengan Kapabilitas SPI \geq Level 3 sebanyak 2 BLUD

Sampai dengan Triwulan IV tahun 2022 realisasi IKK Jumlah BLU/D dengan kapabilitas SPI \geq Level 3 tahun 2022 adalah sebanyak 2 BLU/D atau tercapai 200,00% (maksimal 120,00) dari target 1 BLU/D. Realisasi BLUD dengan kapabilitas SPI

\geq Level 3 yaitu RSUD Wates Kabupaten Kulon Progo dan RSUD Prambanan Kabupaten Sleman.

Kapabilitas Satuan Pengawasan Intern (SPI) BLU/D merupakan suatu model yang memuat karakteristik dasar dan tingkat kapabilitas SPI pada Badan Layanan Umum/Daerah (BLU/D). Peran kelembagaan satuan pengawasan intern, hambatan penataan dan pelaksanaan peran satuan pengawasan internal (SPI), serta tingkat kapabilitas SPI yang terukur akan membantu manajemen dalam merumuskan strategi, kebijakan, serta pengambilan keputusan yang efektif dan efisien dalam mencapai tujuan organisasi.

Kapabilitas SPI \geq Level 3 diperoleh jika SPI mampu memberikan *assurance* secara keseluruhan atas tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern.

Jumlah BLU/D dengan kapabilitas SPI \geq Level 3 diukur dengan Jumlah BLU/D yang melaksanakan peran SPI dengan kapabilitas SPI \geq Level 3

Capaian tahun 2022 tidak dapat diperbandingkan dengan capaian tahun 2021 karena pada tahun 2021 tidak ada target.

Jika dibandingkan dengan target akhir periode renstra tahun 2020 - 2024 sebanyak 1 BLU/D telah tercapai 200,00%

Perkembangan IKK "Jumlah BLU/D dengan Kapabilitas SPI \geq Level 3" dapat dilihat pada Grafik dibawah ini.



b. Pendukung Pengawasan

Sesuai dengan perjanjian kinerja revisi Tahun 2022, Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta mempunyai 7 (tujuh) indikator kinerja kegiatan (IKK) dengan capaian kinerja diuraikan sebagai berikut:

1) IKK: Nilai Zona Integritas Unit Kerja

Nilai Zona Integritas
Perwakilan BPKP
D.I. Yogyakarta 91,69

Target kinerja ini pada tahun 2022 dengan skor 75. Pada tahun 2022, berdasarkan hasil penilaian Inspektorat, skor Zona Integritas Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta mencapai skor 91,69 atau mencapai 122,25% (maksimal 120%) dari target yang ditetapkan. Pada tahun 2021 nilai zona integritas memperoleh skor 90,68 atau mencapai 120,91% dengan target skor 75, sehingga capaian skor nilai zona integritas tahun 2022 meningkat 1,01% . Jika dibandingkan

dengan target akhir renstra periode 2020-2024 dengan skor 79 telah tercapai 116,06 %.

Nilai Skor Zona Integritas diukur sesuai dengan Pedoman Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas yang dikeluarkan oleh Kementerian PANRB kapabilitas SPI \geq Level 3.

Perkembangan IKK “Nilai Zona Integritas Unit Kerja” dapat dilihat pada Grafik dibawah ini:



2) IKK: Nilai SAKIP Unit Kerja

Nilai SAKIP
Perwakilan BPKP D.I.
Yogyakarta 91,40

Penilaian SAKIP dilakukan untuk mengetahui sejauh mana instansi pemerintah mengimplementasikan SAKIP-nya, sekaligus untuk mendorong upaya peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Nilai SAKIP diukur dengan hasil *Self Assesment* SAKIP yang telah dilakukan *Quality Assurance* (QA) oleh Inspektorat BPKP,

Nilai SAKIP Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta berdasarkan Berita Acara hasil evaluasi SAKIP tahun 2022 senilai 91,40 atau 111,46% dari target yang ditetapkan senilai 82.

Pada tahun 2021, nilai SAKIP Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta 90,50 atau mencapai 113,12% dari target sebesar 80, sehingga pencapaian target SAKIP naik 1,66% pada tahun 2022. Jika dibandingkan dengan target akhir renstra periode 2020-2024 dengan target nilai 84, nilai SAKIP Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta telah mencapai 108,80%.

Perkembangan IKK “Nilai SAKIP Unit Kerja” dapat dilihat pada Grafik dibawah ini:



3) IKK: Persentase Efektivitas Pengendalian Intern (SPIP Unit Kerja)

Persentase Efektivitas Pengendalian Intern (SPIP Unit Kerja) Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta sebesar 93,38%

Persentase efektivitas pengendalian intern pada tahun 2022 tercapai 93,38% dan telah tercapai sebesar 132,86% (maksimal 120%) dari target 70,00%.

Efektivitas pengendalian intern dihitung dengan perhitungan (Jumlah Pengendalian *Existing* yang Efektif + Jumlah RTP yang selesai dan efektif) / (Jumlah seluruh pengendalian *existing* + Jumlah RTP yang Selesai) x 100%.

Efektivitas pengendalian intern dihitung sebagai berikut:

Uraian	Jumlah
a. Jumlah Pengendalian existing	111
b. Jumlah Pengendalian existing efektif	103
c. Jumlah RTP	10
d. Jumlah RTP efektif	10
Persentase Efektifitas Pengendalian intern $(b+d)/(a+c) \times 100\% = 80/94 \times 100\%$	93,38%

Persentase efektivitas pengendalian intern pada tahun 2022 mengalami peningkatan dari yang sebelumnya (pada tahun 2021) sebesar 85,11%

menjadi 93,38% pada tahun 2022. Capaian ini tidak dapat dibandingkan dengan target akhir renstra tahun 2020-2024 karena merupakan IKK yang baru muncul di tahun 2021 dan belum masuk dalam renstra 2020-2024. Capaian IKK “Efektivitas Pengendalian Intern” dapat dilihat pada Grafik dibawah ini:



4) IKK: Persentase Penyelesaian RTP (MRI Unit Kerja)

Persentase Penyelesaian RTP (MRI Unit Kerja) sebesar 100,00%

Persentase Penyelesaian RTP (MRI Unit Kerja) dihitung berdasarkan jumlah RTP yang diselesaikan dibagi dengan jumlah RTP dikali 100%.

Penilaian ini digunakan dalam rangka menilai penerapan manajemen risiko pada unit kerja. Berdasarkan aplikasi yang digunakan oleh unit kerja yaitu RMIS, pada tahun 2022, Rencana Tindak Penyelesaian sebanyak 10 RTP dan telah diselesaikan seluruhnya atau 100%.

Pada tahun 2021, nilai RTP (MR Unit Kerja) Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta 100% atau telah mencapai 100% dari target sebesar 100%. Persentase penyelesaian pada tahun 2021 dan 2022 telah mencapai target sebesar 100. Capaian ini tidak dapat dibandingkan dengan target akhir renstra tahun 2020-2024 karena merupakan IKK yang baru muncul di tahun 2021 dan belum masuk dalam renstra 2020-2024.

Capaian IKK “Persentase Penyelesaian RTP” dapat dilihat pada Grafik dibawah ini:



5) IKK: Indeks Kualitas Layanan Eksternal Unit Kerja

Indeks Kualitas Layanan Eksternal Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta sebesar 84,85

Indeks kualitas layanan eksternal unit kerja Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta diukur dengan hasil survey kepada para mitra di lingkungan unit kerja

Pada tahun 2022, indeks kualitas layanan eksternal unit kerja Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta memperoleh nilai 84,85 atau mencapai 113,13% dari target sebesar 75.

Pada tahun 2021 Indeks kualitas layanan eksternal unit kerja memperoleh 86,35 atau mencapai 115,13% dari target sebesar 75, sehingga capaian indeks kepuasan layanan unit kerja tahun 2022 menurun sebesar 1,5%. Jika dibandingkan dengan target akhir renstra periode tahun 2020-2024 dengan target 81, indeks kepuasan layanan unit kerja telah mencapai 104,75%.

Perkembangan IKK “Indeks Kualitas Layanan Eksternal Unit Kerja” dapat dilihat pada Grafik dibawah ini:



6) IKK: Skor IKPA Unit Kerja

Skor IKPA Unit Kerja Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta sebesar 97,51*)

Skor IKPA diukur dengan skor Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan.

Target kinerja ini pada tahun 2022 senilai 95 dan telah tercapai dengan skor 97,51*) atau mencapai 102,64% dari target yang ditetapkan. Informasi ini diperoleh dari data Om SPAN Kementerian Keuangan tahun 2022.

Pada tahun 2021 skor IKPA adalah 97,27 atau mencapai 102,39% dengan target skor 95, sehingga capaian skor nilai IKPA tahun 2022 meningkat sebesar 0,24 atau 0,25%. Jika dibandingkan dengan target akhir renstra periode tahun 2020-2024 dengan skor 90 telah tercapai 108,34 %.

Perkembangan IKK “Skor IKPA Unit Kerja” dapat dilihat pada Grafik dibawah ini:



7) IKK: Nilai Pengelolaan BMN Unit Kerja

Nilai Pengelolaan BMN Unit Kerja Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta sebesar 105,20

Nilai Pengelolaan BMN Unit Kerja diukur dengan hasil penilaian pengelolaan BMN yang dilakukan secara *self assessment* dan kemudian divalidasi oleh Biro Umum.

Penilaian secara *self assessment* pengelolaan BMN unit kerja diukur melalui pengisian daftar pertanyaan disertai dengan pengunggahan bukti dokumen secara daring. Daftar pertanyaan berjumlah 34 pertanyaan “ya” dan “tidak”,

dengan hasil penilaian mandiri yang telah divalidasi oleh Biro UMUM BPKP Pusat sebagai berikut:

Kelompok	Skor	Total	Persentase
Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran	22	22	100%
Pengadaan	13,8	14	99%
Penggunaan dan pemanfaatan	20	20	100%
Pengamanan dan pemeliharaan	15,8	16	99%
Pemindahtanganan Penghapusan dan Pemusnahan	4	8	50%
Penatausahaan	19,6	20	98%
Pembinaan Pengawasan dan Pengendalian	10	10	100%
	105,20	110	95,64%

Dari hasil penilaian mandiri diperoleh nilai pengelolaan BMN unit kerja dengan skor 108 dan telah di validasi oleh Biro Umum BPKP Pusat dengan skor 105,20 atau tercapai 95,64%. Capaian tahun 2022 adalah 105,20 dengan predikat Memuaskan dari target yang ditetapkan sebesar 80 dengan predikat Baik. Hal ini didukung dengan koordinasi dan komunikasi antar personil pada Sub Bagian Umum.

Pada tahun 2021, nilai pengelolaan BMN Unit Kerja adalah sebesar skor 94,08 atau 94,08%, dari target skor 100 atau 100%. Sehingga capaian persentase nilai pengelolaan BMN unit kerja meningkat sebesar 11,12%. IKK ini tidak dapat diperbandingkan dengan target akhir periode renstra tahun 2020-2024 karena perbedaan satuan target.

Perkembangan IKK "Nilai Pengelolaan BMN Unit Kerja" dapat dilihat pada Grafik dibawah ini:



Rincian target dan realisasi *outcome* sesuai Perjanjian Kinerja tahun 2022 pada Lampiran 1.

3. Pelaksanaan Rencana Kegiatan Tahunan (RKT) Pengawasan (PKPT) yang Mendukung Pencapaian *Outcome* dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022

a. Target Output Pengawasan

Berdasarkan Revisi RKAKL tahun 2022 tanggal 27 Desember 2022 dan Aplikasi SIMA sampai dengan 31 Desember 2022, target Pengawasan Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta Tahun 2022 beserta anggarannya adalah sebagai berikut:

No	Kode	Program/Kegiatan /Rincian Output (RO)	Vol	Anggaran (Rp)	Bidwas	Topik	PKPT	PP
	3701							
A	FAG	Pengawasan Pembangunan (baseline)						
1	3701.FAG.005	Rekomendasi hasil pengawasan kinerja pembangunan atas program pembangunan regional	2	85.000.000	APD	2	2	3
					IPP	2	2	2
2	3701.FAG.011	Rekomendasi hasil pengawasan pengembangan JFA	1	21.731.000	P3A	1	1	3
3	3701.FAG.012	Hasil Koordinasi Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan, dan Tindak Lanjut	1	45.784.000	P3A	1	1	8
4	3701.FAG.U02	Rekomendasi hasil pengawasan atas akuntabilitas keuangan daerah	7	191.782.000	APD	11	12	37
					P3A	1	1	4
					IPP	2	2	2
5	3701.FAG.U06	Rekomendasi hasil pengawasan atas akuntabilitas badan usaha	1	55.998.000	AN	3	4	15
6	3701.FAG.U07	Rekomendasi hasil pengawasan pengendalian korupsi	1	28.180.000	Investigasi	1	1	10
Jumlah A			13	428.475.000		24	26	84
B.	FAG	Pengawasan Pembangunan (ABT)						
1	3701.FAG.001	Rekomendasi Hasil Pengawasan Akuntabilitas	1	59.566.000	APD	1	1	2

No	Kode	Program/Kegiatan /Rincian Output (RO)	Vol	Anggaran (Rp)	Bidwas	Topik	PKPT	PP
		Keuangan Negara dan Daerah dalam rangka Pemulihan Ekonomi						
2	3701.FAG.003	Rekomendasi Hasil Pengawasan Kinerja Pembangunan	38	2.331.292.000	APD	4	4	34
					IPP	27	33	40
					AN	5	5	5
					Invest	3	3	3
					P3A	1	1	8
		Jumlah B	39	2.390.858.000		41	47	92
C	UAG	Pengawasan Pembangunan Baseline						
1	3701.UAG.U03	Rekomendasi hasil pengawasan kinerja pembangunan atas program prioritas nasional yang ditargetkan	21	1.089.910.000	APD	10	12	37
					AN	10	11	14
					Investigasi	4	4	20
					IPP	23	28	73
2	3701.UAG.U09	Rekomendasi hasil pengawasan manajemen risiko atas kualitas pengendalian intern Pemerintah Daerah	2	133.355.000	APD	1	1	8
					P3A	1	1	12
3	3701.UAG.U10	Rekomendasi hasil pengawasan manajemen risiko atas kualitas pengendalian intern Badan Usaha	1	82.487.000,00	AN	2	2	6
		Jumlah C	24	1.305.752.000		51	59	170
		Jumlah Total	76	4.125.085		116^{*)}	132	346

*) Jumlah topik pengawasan dalam aplikasi SIMA sebanyak 94 topik. Jumlah 116 topik pengawasan karena terdapat satu topik yang dlampu oleh lebih dari satu bidang maupun karena beda pembebanan anggaran.

Rincian topik lihat Lampiran 2.

b. Realisasi Rincian *Output* (RO) PKPT

Berdasarkan Laporan PP 39 sampai dengan 31 Desember 2022 realisasi rincian *output* (berdasarkan SHP yang sudah final) sebagai berikut:

No	Kode	Target		Realisasi	Capaian (%)
		Program/Kegiatan/Rincian Output (RO)	Vol (lap)	Vol (Lap)	
	3701				
A	FAG	Pengawasan Pembangunan (baseline)			
1	3701.FAG.005	Rekomendasi hasil pengawasan kinerja pembangunan atas program pembangunan regional	2	2	100,00

No	Kode	Target		Realisasi		Capaian (%)
		Program/Kegiatan/Rincian Output (RO)	Vol (lap)	Vol (Lap)		
2	3701.FAG.011	Rekomendasi hasil pengawasan pengembangan JFA	1	1	100,00	
3	3701.FAG.012	Hasil Koordinasi Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan, dan Tindak Lanjut	1	2	200,00	
4	3701.FAG.U02	Rekomendasi hasil pengawasan atas akuntabilitas keuangan daerah	7	10	142,00	
5	3701.FAG.U06	Rekomendasi hasil pengawasan atas akuntabilitas badan usaha	1	3	300,00	
6	3701.FAG.U07	Rekomendasi hasil pengawasan pengendalian korupsi	1	3	300,00	
Jumlah A			13	21	161,54	
B.	FAG	Pengawasan Pembangunan (ABT)				
1	3701.FAG.001	Rekomendasi Hasil Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Negara dan Daerah dalam rangka Pemulihan Ekonomi	1	1	100,00	
2	3701.FAG.003	Rekomendasi Hasil Pengawasan Kinerja Pembangunan	38	42	110,53	
Jumlah B			39	43	110,26	
C	UAG	Pengawasan Pembangunan Baseline				
1	3701.UAG.U03	Rekomendasi hasil pengawasan kinerja pembangunan atas program prioritas nasional yang ditargetkan	21	35	166,67	
2	3701.UAG.U09	Rekomendasi hasil pengawasan manajemen risiko atas kualitas pengendalian intern Pemerintah Daerah	2	2	100,00	
3	3701.UAG.U10	Rekomendasi hasil pengawasan manajemen risiko atas kualitas pengendalian intern Badan Usaha	1	3	300,00	
Jumlah C			24	40	166,67	
Jumlah Total			76	104	136,84	

Rincian lihat Lampiran 3.

c. Pelaksanaan Rencana Kegiatan Tahunan (RKT) Pengawasan (PKPT)

Berdasarkan aplikasi New MONSIMA, realisasi penugasan pengawasan s.d Bulan Desember 2022 sebanyak 562 PP atau tercapai 162,43% dari rencana tahun 2022 sebanyak 346 Penugasan Pengawasan (PP). Realisasi penerbitan Laporan Hasil Pengawasan s.d. Bulan Desember 2022 sebanyak 562 LHP atau 162,43% dari rencana Tahun 2022 sebanyak 346 LHP. Sedangkan realisasi penerbitan Laporan Hasil Pengawasan s.d. Bulan Desember 2022 sebanyak 562 LHP, apabila dibandingkan dengan penerbitan surat tugas sebanyak 562 ST, realisasi penerbitan laporan telah tercapai 100,00%.

Realisasi PKPT tahun 2022 s.d. Desember 2022 sebanyak 132 PKPT atau 100,00% dari rencana PKPT tahun 2022 sebanyak 132 PKPT. Realisasi PKPT mengacu pada penerbitan laporan. Rincian realisasi PKPT, penerbitan surat tugas dan penerbitan Laporan Hasil Pengawasan sebagai berikut:

No	Bidang	Target		Realisasi			Capaian (%)			% Realisasi LHP Dibandingkan Realisasi ST
		PKPT	PP	PKPT	PP	Lap	PKPT	PP	Lap	
1	2	3	4	5	6	7	8=5/3	9=6/4	10=7/4	11=7/6
1	IPP	65	117	65	199	199	100,00	170,09	170,09	100,00
2	APD	32	121	32	138	138	100,00	114,05	114,05	100,00
3	AN	22	40	22	93	93	100,00	232,50	232,50	100,00
4	Investigasi	8	33	8	58	58	100,00	175,76	175,76	100,00
5	P3A	5	35	5	74	74	100,00	211,43	211,43	100,00
	Jumlah	132	346	132	562	562	100,00	162,43	162,43	100,00

d. Target dan Realisasi Program Kegiatan Administrasi Umum (PKAU)

Berdasarkan laporan PP 39 sampai dengan 31 Desember 2022 realisasi PKAU sebagai berikut:

No	Nama PKAU	Target 2022 (lap)	Realisasi sd Desember (lap)	% Capaian
1	Penyusunan RKA dan Revisi	1	1	100,00
2	Pengelolaan Pertanggungjawaban Anggaran	1	1	100,00
3	Penyusunan Laporan KLPBU	1	1	100,00
4	Pengelolaan Publikasi dan Kehumasan	1	1	100,00
5	Gaji dan Tunjangan	1	1	100,00
6	Operasional Pemeliharaan Perkantoran	1	1	100,00
7	Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	1	1	100,00
8	Penilaian Angka Kredit	2	2	100,00
9	Pengadaan Barang dan Jasa	1	1	100,00
10	Penyelenggaraan SPIP dan MR	1	1	100,00

No	Nama PKAU	Target 2022 (lap)	Realisasi sd Desember (lap)	% Capaian
11	Penyusunan Bahan Perencanaan, RKT dan Perkin	1	1	100,00
12	Penyusunan Laporan Kinerja Triwulanan	4	4	100,00
13	Penyusunan Laporan Kinerja Tahunan	1	1	100,00
14	Penyelenggaraan RB dan ZI	1	1	100,00
Jumlah		18	18	100,00

e. Penggunaan Hari Produktif

Realisasi penggunaan hari produktif pengawasan PKPT sampai dengan Desember 2022 adalah sebanyak 17.874 OH atau 91,11% dari rencana hari pengawasan satu tahun sebanyak 19.618 OH dengan rincian sebagai berikut:

No	Bidang	Target OH	Realisasi OH	%
1	IPP	7.235	6.622	91,53
2	APD	5.183	4.562	88,02
3	AN	3.392	3.241	95,55
4	Investigasi	1.591	1.377	86,55
5	P3A	2.217	2.072	93,46
Jumlah		19.618	17.874	91,11

f. Penyerapan Anggaran

Realisasi anggaran s.d. Triwulan IV tahun 2022 sebesar Rp30.997.671.724,00 atau 98,98% dari anggaran tahun 2022 sebesar Rp31.316.311.000,00. Rincian realisasi anggaran sebagai berikut:

- Realisasi anggaran Program Pengawasan Pembangunan s.d. Triwulan IV tahun 2022 sebesar Rp4.080.972.037,00 atau 98,93% dari anggaran Tahun 2022 sebesar Rp4.125.085.000,00.



- Realisasi anggaran Program Dukungan Manajemen s.d. Triwulan IV tahun 2022 sebesar Rp26.916.699.687,00 atau 98,99% dari anggaran Tahun 2022 sebesar Rp27.191.226.000,00.



Rencana dan realisasi anggaran s.d. bulan Triwulan IV tahun 2022 secara rinci lihat di Lampiran 4.

Demikian kami sampaikan laporan kinerja Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta s.d. Triwulan IV thun 2022. Atas perkenan Bapak Kepala Perwakilan, kami ucapkan terima kasih.

Korwas Bidang P3APIP,


Ratna Wijihastuti

Target dan Realisasi Outcome Sesuai Perjanjian Kinerja Sampai Dengan Triwulan IV Tahun 2022

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target			Realisasi				
			Satuan	TW IV Tahun 2022	2022	2024	% Realisasi thd target TW IV	% Realisasi thd target 2022	% Realisasi thd target 2024	
1	2	3	4	5	6	6	5	6	7	8
1	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah	1.1 Nilai optimalisasi penerimaan daerah yang terrealisasi 1.2 Nilai efisiensi pengeluaran negara dan daerah 1.3 Nilai penyelamatan keuangan Negara dan daerah	Rp (Juta)	5.630,00	5.630,00	1.029,00	7.653,79	120,00	120,00	743,81
			Rp (Juta)	75.181,00	75.181,00	112.939,00	134.559,00	120,00	120,00	119,14
			Rp (Juta)	1.170,00	1.170,00	103.964,00	20.098,82	120,00	120,00	19,33
2	Meningkatnya Pengawasan Pembangunannya atas Pembangunan Nasional	2.1 Jumlah Proyek Strategis Nasional yang tercapai sesuai target 2.2 Persentase hambatan pelaksanaan pembangunan yang diselesaikan 2.3 Jumlah Kegiatan Prioritas yang Diawasi 2.4 Persentase rekomendasi strategis yang ditindaklanjuti	PSN Persen Kegiatan Prioritas Daerah Persen	2,00 85,00 2,00 80,00	2,00 85,00 2,00 80,00	1,00 85,00	2,00 100,00 2,00 81,82	100,00 117,65 100,00 102,28	100,00 117,65 100,00 102,28	200,00 117,65 - -
3	Meningkatnya Pengawasan Pembangunannya atas Badan Usaha	3.1 Jumlah BUMN dengan pengelolaan korporasinya baik 3.2 Jumlah BUMD dengan kinerja sehat 3.3 Jumlah BLUD dengan kinerja sehat 3.4 Jumlah BUMDes yang mampu menyusun laporan 3.5 Jumlah BUMDes yang memberikan kontribusi pada perekonomian desa 3.6 Jumlah BUMD dengan pengelolaan korporasinya baik	BUMN BUMD BLUD BUMDes BUMDes BUMD	1,00 11,00 1,00 30,00 2,00 1,00	1,00 11,00 1,00 30,00 2,00 1,00	1,00 11,00 2,00 26,00	1,00 12,00 2,00 36,00 3,00 1,00	100,00 109,09 120,00 120,00 120,00 100,00	100,00 109,09 120,00 120,00 120,00 100,00	100,00 109,09 100,00 138,46 - 50,00
4	Meningkatnya Pengawasan Pembangunannya atas Efektivitas Pengendalian Korupsi	4.1 Persentase hasil pengawasan represif yang dimanfaatkan/ditindaklanjuti 4.2 Persentase hasil Pengawasan preventif dan edukatif yang dimanfaatkan/ ditindaklanjuti 4.3 Jumlah Pemda dengan efektivitas pengendalian korupsi baik 4.3 Jumlah Pemda menindak lanjut Area Of Improvement dari hasil pengukuran EPK	Persen Persen Pemda Pemda	100,00 80,00 3,00 2,00	100,00 80,00 3,00 2,00	100,00 90,00 8,00	100,00 100,00 8,00 11,00	100,00 120,00 120,00 120,00	100,00 120,00 120,00 120,00	100,00 111,11 100,00 -
5	Meningkatnya Pengawasan Pembangunannya atas Kualitas Pengendalian Intern K/L/P/BU	5.1 Jumlah APIP Provinsi dengan Kapabilitas APIP ≥ Level 3 5.2 Jumlah APIP Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas APIP ≥ Level 3 5.3 Jumlah Provinsi dengan Maturitas SPIP ≥ Level 3	Prov Kab/kota Prov	1,00 9,00 1,00	1,00 9,00 1,00	1,00 11,00 1,00	1,00 11,00 1,00	100,00 120,00 100,00	100,00 120,00 100,00	100,00 100,00 100,00

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target			Realisasi				
			Satuan	TW IV Tahun 2022	2022	2024	TW IV Tahun 2022	% Realisasi thd target TW IV	% Realisasi thd target 2022	% Realisasi thd target 2024
1	2	3	4	5	6	6	5	6	7	8
5.4		Jumlah Kabupaten/kota dengan Maturitas SPIP ≥ Level 3	Kab/kota	10,00	10,00	11,00	10,00	100,00	100,00	90,91
5.5		Jumlah Provinsi dengan MRI ≥ Level 3	Prov	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00	100,00
5.6		Jumlah Kab/kota dengan MRI ≥ Level 3	Kab/kota	3,00	3,00	8,00	7,00	120,00	120,00	87,50
5.7		Pemda yang akuntabel dalam pengelolaan keuangan dan kinerja daerah	Pemda	6,00	6,00	9,00	7,00	116,67	116,67	77,78
5.8		Jumlah Desa yang pengelolaan keuangannya akuntabel	Desa	20,00	20,00		60,00	120,00	120,00	-
5.9		Jumlah desa yang menerapkan pengelolaan aset desa secara memadai	Desa	20,00	20,00	511,00	246,00	120,00	120,00	48,14
5.10		Jumlah BLUD dengan MRI ≥ Level 3	BLUD	4,00	4,00	7,00	4,00	100,00	100,00	57,14
5.11		Jumlah BUMD dengan kapabilitas SPI ≥ Level 3	BUMD	1,00	1,00	2,00	1,00	100,00	100,00	50,00
5.12		Jumlah BLU/D dengan kapabilitas SPI ≥ Level 3	BLUD	1,00	1,00	1,00	2,00	120,00	120,00	200,00
6.1	Meningkatnya Tata Kelola Unit Kerja	Nilai Skor Zona Integritas Unit Kerja	Skor Skala 100	75,00	75,00	79,00	91,69	120,00	120,00	116,06
6.2		Nilai SAKIP Unit Kerja	Skor Skala 100	82,00	82,00	84,00	91,40	111,46	111,46	108,81
6.3		Persentase efektivitas pengendalian intern (SPIP Unit Kerja)	Persen	70,00	70,00		93,38	120,00	120,00	-
6.4		Persentase Penyelesaian RTP (MR Unit Kerja)	Persen	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	-
6.5		Indeks Kepuasan Layanan Unit Kerja (khusus Unit Kerja Perwakilan)	Indeks Skala 100	75,00	75,00	81,00	84,85	113,13	113,13	104,75
6.6		Skor IKPA Unit Kerja (khusus Unit Kerja Mandiri)	Skor Skala 100	95,00	95,00	90,00	97,51	102,64	102,64	108,34
6.7		Nilai Pengelolaan BMN Unit Kerja (khusus Unit Kerja Mandiri)	Nilai	80,00	80,00		105,20	120,00	120,00	-

No	Topik	PKPT	Bidwases	Rindian RO	ket
90	Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa	107474	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Akuntabilitas Pemerintahan Daerah	49.FAG.U03 - Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi Hasil Pengawasan Kinerja Pembangunan	ABT
91	Reviu Pembayaran Tunggakan Tunjangan Kinerja Guru dan Pengawas PNS Pendidikan Agama Kristen Kemendiknas	108027	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Pengawasan Instansi Pemerintahan Pusat	49.FAG.U03 - Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi Hasil Pengawasan Kinerja Pembangunan	ABT
92	Pengawasan atas Program Hibah Air Minum Perdesaan Pemerintah Pusat ke Pemda pada Kementerian PUPR	108069	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Pengawasan Instansi Pemerintahan Pusat	49.FAG.U02 - Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi hasil pengawasan atas akuntabilitas keuangan daerah	MITRA
93	Pengawasan atas Eligibilitas pembangunan infrastruktur air limbah setempat dalam rangka hibah Pemerintah Pusat ke Pemda	108085	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Pengawasan Instansi Pemerintahan Pusat	49.FAG.U02 - Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi hasil pengawasan atas akuntabilitas keuangan daerah	MITRA
94	Efektivitas Pengendalian Infiasi di Daerah	108120	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Akuntabilitas Pemerintahan Daerah	49.UAG.U03 - Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi hasil pengawasan kinerja pembangunan atas program prioritas nasional yang ditargetkan	Baseline

Ket:

-Jumlah pkpt 132

-Jumlah topik 94

- Topik ABT 39 , dari 39 sebanyak 15 topik dobel dengan baseline dan 24 murni ABT, serta 2 topik di ampu oleh 2 bidang yaitu potensi desa (AN dan APD), P3DN daerah (APD dan P3A)

Topik ada di Rincian RO Baseline maupun ABT

No	Topik	PKPT	Bidwas	Rindlan RO	ket
79	Reformasi Sistem Kesehatan-Layanan Rujukan	105130	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat	49.FAG.003 - Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi Hasil Pengawasan Kinerja Pembangunan	ABT
80	Respons Kecurangan	102304	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Investigasi	49.UAG.U03 - Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi hasil pengawasan kinerja pembangunan atas program prioritas nasional yang ditargetkan	Baseline
	Respons Kecurangan	107266	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Investigasi	49.FAG.003 - Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi Hasil Pengawasan Kinerja Pembangunan	ABT
	Reviu Tata Kelola Proyek Strategis Nasional (PSN)	103682	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat	49.UAG.U03 - Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi hasil pengawasan kinerja pembangunan atas program prioritas nasional yang ditargetkan	Baseline
	Reviu Tata Kelola Proyek Strategis Nasional (PSN)	103685	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Akuntan negara	49.UAG.U03 - Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi hasil pengawasan kinerja pembangunan atas program prioritas nasional yang ditargetkan	Baseline
	Reviu Tata Kelola Proyek Strategis Nasional (PSN)	103692	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat	49.UAG.U03 - Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi hasil pengawasan kinerja pembangunan atas program prioritas nasional yang ditargetkan	Baseline
	Reviu Tata Kelola Proyek Strategis Nasional (PSN)	103695	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat	49.UAG.U03 - Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi hasil pengawasan kinerja pembangunan atas program prioritas nasional yang ditargetkan	Baseline
	Reviu Tata Kelola Proyek Strategis Nasional (PSN)	103605	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat	49.FAG.003 - Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi Hasil Pengawasan Kinerja Pembangunan	ABT
	Reviu Tata Kelola Proyek Strategis Nasional (PSN)	105556	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat	49.UAG.U03 - Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi hasil pengawasan kinerja pembangunan atas program prioritas nasional yang ditargetkan	Baseline
	Reviu Tata Kelola Proyek Strategis Nasional (PSN)	107310	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat	49.FAG.003 - Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi Hasil Pengawasan Kinerja Pembangunan	ABT
	Reviu Tata Kelola Proyek Strategis Nasional (PSN)	107319	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat	49.FAG.003 - Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi Hasil Pengawasan Kinerja Pembangunan	ABT
81	Reviu Tata Kelola Proyek Strategis Nasional (PSN)	107321	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat	49.FAG.003 - Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi Hasil Pengawasan Kinerja Pembangunan	ABT
	Reviu Tata Kelola Proyek Strategis Nasional (PSN)	107334	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat	49.FAG.003 - Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi Hasil Pengawasan Kinerja Pembangunan	ABT
	SPIP	102295	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah	49.UAG.U09 - Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi hasil pengawasan manajemen risiko atas kualitas pengendalian intern Pemerintah Daerah	Baseline
	Stunting	101482	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat	49.FAG.003 - Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi Hasil Pengawasan Kinerja Pembangunan	ABT
	Stunting	107643	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah	49.FAG.U02 - Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi hasil pengawasan atas akuntabilitas keuangan daerah	Baseline
	Tata Kelola Cadangan Pangan Pemerintah	104822	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Akuntan negara	49.FAG.003 - Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi Hasil Pengawasan Kinerja Pembangunan	ABT
	Tata Kelola Cadangan Pangan Pemerintah Daerah	101507	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah	49.UAG.U03 - Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi hasil pengawasan kinerja pembangunan atas program prioritas nasional yang ditargetkan	Baseline
	Tata Kelola Cadangan Pangan Pemerintah Daerah	107338	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah	49.FAG.003 - Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi Hasil Pengawasan Kinerja Pembangunan	ABT
	Tata Kelola dan Akuntabilitas Aset Desa	101537	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah	49.FAG.U02 - Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi hasil pengawasan atas akuntabilitas keuangan daerah	Baseline
	87	Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Desa	101923	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah	49.FAG.U02 - Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi hasil pengawasan atas akuntabilitas keuangan daerah
Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Desa		106894	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Program dan Pelaporan serta Pembinaan APIP	49.FAG.U02 - Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi hasil pengawasan atas akuntabilitas keuangan daerah	Baseline
88	Tata Kelola dan Perencanaan Pembangunan Desa	101531	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah	49.FAG.U02 - Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi hasil pengawasan atas akuntabilitas keuangan daerah	Baseline
	Tata Kelola Subsidi Pupuk	103078	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Akuntan negara	49.FAG.003 - Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi Hasil Pengawasan Kinerja Pembangunan	ABT

No	Topik	PKPT	Bidwas	Rincian RO	ket
	Peningkatan Akses Permodalan	105236	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat	49.FAG.003 - Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi Hasil Pengawasan Kinerja Pembangunan	ABT
64	Peningkatan Akuntabilitas Aset Daerah	105866	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah	49.UAG.U03 - Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi hasil pengawasan kinerja pembangunan atas program prioritas nasional yang ditargetkan	Baseline
	Peningkatan Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Daerah	103816	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah	49.UAG.U03 - Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi hasil pengawasan kinerja pembangunan atas program prioritas nasional yang ditargetkan	Baseline
65	Peningkatan Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Daerah	105863	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah	49.UAG.U03 - Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi hasil pengawasan kinerja pembangunan atas program prioritas nasional yang ditargetkan	Baseline
	Peningkatan Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Daerah	105874	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah	49.UAG.U03 - Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi hasil pengawasan kinerja pembangunan atas program prioritas nasional yang ditargetkan	Baseline
66	Peningkatan Aset Produktif	105240	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat	49.FAG.003 - Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi Hasil Pengawasan Kinerja Pembangunan	ABT
67	Peningkatan Kualitas Belanja Pemerintah Daerah, melalui Ketepatan dan Efektivitas Penggunaan Dana Transfer (fokus pada sektor pendidikan dasar dan menengah)	107269	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah	49.FAG.001 - Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi Hasil Pengawasan Kinerja Pembangunan	ABT
68	Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Daerah	103076	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah	49.FAG.U02 - Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi hasil pengawasan atas akuntabilitas keuangan daerah	Baseline
69	Peningkatan Sarana-Prasarana Pendidikan	103792	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat	49.FAG.003 - Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi Hasil Pengawasan Kinerja Pembangunan	ABT
70	Peningkatan Tata Kelola Data Terpadu Penerima Manfaat Bantuan Pemerintah (DTKS dan Basis Data Terkait Lainnya)	105135	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat	49.UAG.U03 - Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi hasil pengawasan kinerja pembangunan atas program prioritas nasional yang ditargetkan	Baseline
	Percepatan Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	103083	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah	49.FAG.U02 - Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi hasil pengawasan atas akuntabilitas keuangan daerah	Baseline
71	Percepatan Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	103819	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah	49.UAG.U03 - Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi hasil pengawasan kinerja pembangunan atas program prioritas nasional yang ditargetkan	Baseline
72	Perencanaan, Analisis, Evaluasi dan Pelaporan Pengawasan	104827	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Program dan Pelaporan serta Pembinaan APIP	49.FAG.012 - Pengawasan Pembangunan - Hasil Koordinasi Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan, dan Tindak Lanjut	Baseline
73	PKH	105221	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat	49.FAG.003 - Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi Hasil Pengawasan Kinerja Pembangunan	ABT
74	Program Indonesia Pintar (KIP dan KIP Kuliah)	106593	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat	49.UAG.U03 - Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi hasil pengawasan kinerja pembangunan atas program prioritas nasional yang ditargetkan	Baseline
75	Program Prioritas Peningkatan Akses dan Mutu Kesehatan	105718	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat	49.UAG.U03 - Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi hasil pengawasan kinerja pembangunan atas program prioritas nasional yang ditargetkan	Baseline
76	Reformasi Birokrasi	100744	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat	49.FAG.003 - Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi Hasil Pengawasan Kinerja Pembangunan	ABT
77	Reformasi Sistem Kesehatan-Kualitas dan Redistribusi Tenaga Kesehatan	105132	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat	49.FAG.003 - Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi Hasil Pengawasan Kinerja Pembangunan	ABT
78	Reformasi Sistem Kesehatan-Layanan Primer	105128	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat	49.FAG.003 - Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi Hasil Pengawasan Kinerja Pembangunan	ABT
	Reformasi Sistem Kesehatan-Layanan Primer	107646	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah	49.FAG.U02 - Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi hasil pengawasan atas akuntabilitas keuangan daerah	Baseline

No	Topik	PKPT	Bidwas	Rindlan RO	ket
48	Pengawasan atas akuntabilitas keuangan negara/daerah	104112	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Investigasi	49.UAG.U03 - Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi hasil pengawasan kinerja pembangunan atas program prioritas nasional yang ditargetkan	Baseline
49	Pengawasan atas Hambatan Kelancaran Pembangunan	104103	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Investigasi	49.UAG.U03 - Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi hasil pengawasan kinerja pembangunan atas program prioritas nasional yang ditargetkan	Baseline
50	Pengawasan atas Pengelolaan Sampah Terpadu (PST) Plyungan.	103063	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat	49.FAG.005 - Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi hasil pengawasan kinerja pembangunan atas program pembangunan regional	Baseline
51	Pengawasan atas Proyek Prioritas Strategis RKP Tahun 2022	105577	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat	49.UAG.U03 - Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi hasil pengawasan kinerja pembangunan atas program prioritas nasional yang ditargetkan	Baseline
52	Pengawasan Pengadaan PPPK	107323	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat	49.FAG.003 - Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi Hasil Pengawasan Kinerja Pembangunan	ABT
53	Pengawasan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Minyak Goreng PKL dan Warung yang disalurkan oleh TNI dan Polri	107343	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat	49.FAG.003 - Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi Hasil Pengawasan Kinerja Pembangunan	ABT
54	Pengawasan Sisa Bos Tahun 2011 dan 2019 pada Pemerintah Daerah	103818	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah	49.FAG.U02 - Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi hasil pengawasan atas akuntabilitas keuangan daerah	Baseline
55	Pengawasan terhadap Program for Result untuk Disbursement Linked Indicators (DLI) Program Reformasi Bantuan Sosial	103812	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat	49.UAG.U03 - Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi hasil pengawasan kinerja pembangunan atas program prioritas nasional yang ditargetkan	Baseline
56	Pengembangan DPSP	102770	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat	49.FAG.003 - Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi Hasil Pengawasan Kinerja Pembangunan	ABT
57	Pengembangan DPSP	105507	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat	49.FAG.003 - Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi Hasil Pengawasan Kinerja Pembangunan	ABT
57	Pengembangan Keterampilan dan Layanan Usaha	102267	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat	49.FAG.003 - Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi Hasil Pengawasan Kinerja Pembangunan	ABT
58	Pengembangan Kewirausahaan Baru untuk Pemulihan Ekonomi	106790	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat	49.FAG.005 - Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi hasil pengawasan kinerja pembangunan atas program pembangunan regional	Baseline
58	Pengembangan Kewirausahaan, Kemitraan dan Keperantaraan	101262	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Akuntan negara	49.UAG.U03 - Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi hasil pengawasan kinerja pembangunan atas program prioritas nasional yang ditargetkan	Baseline
59	Pengembangan Kewirausahaan, Kemitraan dan Keperantaraan	102255	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat	49.FAG.003 - Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi Hasil Pengawasan Kinerja Pembangunan	ABT
60	Pengembangan Potensi Desa	101132	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Akuntan negara	49.UAG.U03 - Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi hasil pengawasan kinerja pembangunan atas program prioritas nasional yang ditargetkan	Baseline
60	Pengembangan Potensi Desa	101545	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah	49.UAG.U03 - Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi hasil pengawasan kinerja pembangunan atas program prioritas nasional yang ditargetkan	Baseline
60	Pengembangan Potensi Desa	107302	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Akuntan negara	49.FAG.003 - Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi Hasil Pengawasan Kinerja Pembangunan	ABT
60	Pengembangan Potensi Desa	107342	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah	49.FAG.003 - Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi Hasil Pengawasan Kinerja Pembangunan	ABT
61	Penggunaan Dana Siap Pakat (DSP)	103814	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat	49.UAG.U03 - Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi hasil pengawasan kinerja pembangunan atas program prioritas nasional yang ditargetkan	Baseline
62	Penggiatan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	101475	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat	49.UAG.U03 - Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi hasil pengawasan kinerja pembangunan atas program prioritas nasional yang ditargetkan	Baseline
62	Peningkatan Akses Permodalan	103598	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat	49.FAG.003 - Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi Hasil Pengawasan Kinerja Pembangunan	ABT
63	Peningkatan Akses Permodalan	103675	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Akuntan negara	49.UAG.U03 - Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi hasil pengawasan kinerja pembangunan atas program prioritas nasional yang ditargetkan	Baseline

No	Topik	PKPT	Bidwas	Rincian RO	ket
	P3DN Pemerintah Daerah	107054	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah	49.UAG.U03 - Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi hasil pengawasan kinerja pembangunan atas program prioritas nasional yang ditargetkan	Baseline
36	P3DN Pemerintah Daerah	107329	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah	49.FAG.003 - Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi Hasil Pengawasan Kinerja Pembangunan	ABT
	P3DN Pemerintah Daerah	107489	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Program dan Pelaporan serta Pembinaan APIP	49.FAG.003 - Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi Hasil Pengawasan Kinerja Pembangunan	ABT
37	Pemanfaatan APBD untuk PC-PEN (termasuk TKDD); Peningkatan Kualitas Belanja Pemerintah Daerah, melalui Ketepatan dan Efektivitas Penggunaan Dana Transfer (fokus pada sektor pendidikan dasar dan menengah)	100800	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah	49.FAG.U02 - Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi hasil pengawasan atas akuntabilitas keuangan daerah	Baseline
	Pemanfaatan APBD untuk PC-PEN (termasuk TKDD); Peningkatan Kualitas Belanja Pemerintah Daerah, melalui Ketepatan dan Efektivitas Penggunaan Dana Transfer (fokus pada sektor pendidikan dasar dan menengah)	100836	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah	49.FAG.U02 - Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi hasil pengawasan atas akuntabilitas keuangan daerah	Baseline
38	Pembangunan Bandara	103205	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Akuntan negara	49.FAG.003 - Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi Hasil Pengawasan Kinerja Pembangunan	ABT
39	Pembangunan Jalur Kereta Api (termasuk kereta cepat Jkt - Bdg)	105494	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat	49.FAG.003 - Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi Hasil Pengawasan Kinerja Pembangunan	ABT
40	Penanganan Covid-19-PBJ (Alat Testing/Tracing, Almatikes, Obat dan Faskes)	106090	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah	49.UAG.U03 - Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi hasil pengawasan kinerja pembangunan atas program prioritas nasional yang ditargetkan	Baseline
41	Penanganan Covid-19-Pembayaran Klaim RS	101520	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Akuntan negara	49.UAG.U03 - Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi hasil pengawasan kinerja pembangunan atas program prioritas nasional yang ditargetkan	Baseline
	Penanganan Covid-19-Pembayaran Klaim RS	105127	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat	49.UAG.U03 - Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi hasil pengawasan kinerja pembangunan atas program prioritas nasional yang ditargetkan	Baseline
42	Penanganan Covid-19-Vaksinasi	101860	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat	49.UAG.U03 - Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi hasil pengawasan kinerja pembangunan atas program prioritas nasional yang ditargetkan	Baseline
	Penanganan Covid-19-Vaksinasi	105124	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat	49.UAG.U03 - Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi hasil pengawasan kinerja pembangunan atas program prioritas nasional yang ditargetkan	Baseline
43	Penanggulangan Bencana	103813	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat	49.FAG.003 - Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi Hasil Pengawasan Kinerja Pembangunan	ABT
	Pencegahan Kecurangan	102308	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Investigasi	49.FAG.U07 - Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi hasil pengawasan pengendalian korupsi	Baseline
44	Pencegahan Kecurangan	107265	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Investigasi	49.FAG.003 - Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi Hasil Pengawasan Kinerja Pembangunan	ABT
45	Penempatan Dana	105203	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Akuntan negara	49.UAG.U03 - Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi hasil pengawasan kinerja pembangunan atas program prioritas nasional yang ditargetkan	Baseline
46	Penerapan JFA pada APIP K/L/D	103664	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Program dan Pelaporan serta Pembinaan APIP	49.FAG.011 - Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi hasil pengawasan pengembangan JFA	Baseline
47	Pengadaan PPKP Formasi Tahun 2022	103804	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat	49.UAG.U03 - Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi hasil pengawasan kinerja pembangunan atas program prioritas nasional yang ditargetkan	Baseline

No	Topik	PKPT	Bidwas	Rincian RO	ket
17	Implementasi Bansos APBD	100795	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah	49.UAG.U03 - Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi hasil pengawasan kinerja pembangunan atas program prioritas nasional yang ditargetkan	Baseline
18	Implementasi Bansos APBDesa	101488	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah	49.UAG.U03 - Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi hasil pengawasan kinerja pembangunan atas program prioritas nasional yang ditargetkan	Baseline
19	Implementasi Bansos APBN (PKH, Kartu Sembako, Kartu Prakerja)	105214	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat	49.UAG.U03 - Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi hasil pengawasan kinerja pembangunan atas program prioritas nasional yang ditargetkan	Baseline
20	Infrastruktur Jalan Tol	102364	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat	49.FAG.003 - Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi Hasil Pengawasan Kinerja Pembangunan	ABT
21	Infrastruktur Sistem Pengolahan Air Limbah (SPAL)	102340	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat	49.FAG.003 - Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi Hasil Pengawasan Kinerja Pembangunan	ABT
22	Infrastruktur SPAM	102353	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat	49.FAG.003 - Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi Hasil Pengawasan Kinerja Pembangunan	ABT
23	Infrastruktur SPAM	103206	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Akuntan negara	49.UAG.U03 - Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi hasil pengawasan kinerja pembangunan atas program prioritas nasional yang ditargetkan	Baseline
24	Kapabilitas APIP	102287	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Program dan Pelaporan serta Pembinaan APIP	49.UAG.U09 - Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi hasil pengawasan manajemen risiko atas kualitas pengendalian intern Pemerintah Daerah	Baseline
25	Kartu Indonesia Pintar	107365	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat	49.FAG.003 - Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi Hasil Pengawasan Kinerja Pembangunan	ABT
26	Kartu Indonesia Sehat	105228	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat	49.FAG.003 - Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi Hasil Pengawasan Kinerja Pembangunan	ABT
27	Kartu Sembako	105226	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat	49.FAG.003 - Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi Hasil Pengawasan Kinerja Pembangunan	ABT
28	Kebijakan Peningkatan Kualitas Pendidikan Nasional	101441	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat	49.UAG.U03 - Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi hasil pengawasan kinerja pembangunan atas program prioritas nasional yang ditargetkan	Baseline
29	Kemudahan Perizinan (OSS)	102564	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah	49.FAG.005 - Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi hasil pengawasan kinerja pembangunan atas program pembangunan regional	Baseline
30	Kontribusi atas Pembangunan Nasional	105287	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Akuntan negara	49.UAG.U10 - Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi hasil pengawasan manajemen risiko atas kualitas pengendalian intern Badan Usaha	Baseline
31	Kualitas Pengendalian Intern	105280	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Akuntan negara	49.UAG.U10 - Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi hasil pengawasan manajemen risiko atas kualitas pengendalian intern Badan Usaha	Baseline
32	Optimalisasi PAD	103100	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah	49.FAG.U02 - Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi hasil pengawasan akuntabilitas keuangan daerah	Baseline
33	Optimalisasi Pemanfaatan KPBU	102763	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat	49.UAG.U03 - Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi hasil pengawasan kinerja pembangunan atas program prioritas nasional yang ditargetkan	Baseline
34	P3DN Badan Usaha	107097	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Akuntan negara	49.FAG.003 - Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi Hasil Pengawasan Kinerja Pembangunan	ABT
35	P3DN Badan Usaha	107644	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah	49.FAG.U02 - Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi hasil pengawasan akuntabilitas keuangan daerah	Baseline
36	P3DN Badan Usaha	107127	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Akuntan negara	49.UAG.U03 - Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi hasil pengawasan kinerja pembangunan atas program prioritas nasional yang ditargetkan	Baseline
37	P3DN Badan Usaha	107305	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Akuntan negara	49.UAG.U03 - Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi hasil pengawasan kinerja pembangunan atas program prioritas nasional yang ditargetkan	Baseline
38	P3DN Nasional	103194	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat	49.FAG.003 - Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi Hasil Pengawasan Kinerja Pembangunan	ABT
39	P3DN Nasional	107309	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat	49.FAG.003 - Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi Hasil Pengawasan Kinerja Pembangunan	ABT

JUMLAH TOPIK SAMPAI DENGAN BULAN DESEMBER 2022 DI APLIKASI SIMA

No	Topik	PKPT	Bidangs	Rindian RO	ket
1	Audit Keuangan atas Pinjaman dan Bantuan Luar Negeri	105295	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat	49.UAG.U03 - Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi hasil pengawasan kinerja pembangunan atas program prioritas nasional yang ditargetkan	Baseline
	Audit Keuangan atas Pinjaman dan Bantuan Luar Negeri	105299	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat	49.UAG.U03 - Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi hasil pengawasan kinerja pembangunan atas program prioritas nasional yang ditargetkan	Baseline
2	Audit Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) Kementerian PUPR	103521	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat	49.UAG.U03 - Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi hasil pengawasan kinerja pembangunan atas program prioritas nasional yang ditargetkan	Baseline
3	Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	103055	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah	49.FAG.U05 - Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi hasil pengawasan kinerja pembangunan atas program pembangunan regional	Baseline
4	Bantuan Operasional Sekolah	101459	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat	49.UAG.U03 - Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi hasil pengawasan kinerja pembangunan atas program prioritas nasional yang ditargetkan	Baseline
5	Bantuan Pemerintah untuk Usaha Mikro	102987	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat	49.UAG.U03 - Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi hasil pengawasan kinerja pembangunan atas program prioritas nasional yang ditargetkan	Baseline
6	Bantuan Stimulus kepada Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pada Masa Pandemi Covid-19	102480	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat	49.FAG.U03 - Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi Hasil Pengawasan Kinerja Pembangunan	ABT
7	Bantuan Tunai bagi Pedagang Kaki Lima, Warung, dan Nelayan	106565	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat	49.UAG.U03 - Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi hasil pengawasan kinerja pembangunan atas program prioritas nasional yang ditargetkan	Baseline
8	Bimtek Manajemen Risiko Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Tahun 2024 pada KPU dan Bawaslu	105821	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat	49.UAG.U03 - Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi hasil pengawasan kinerja pembangunan atas program prioritas nasional yang ditargetkan	Baseline
9	BLU/BLUD (Fokus pada BLU/BLUD Kesehatan dan BLU/BLUD Pendidikan)	101078	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Akuntan negara	49.FAG.U06 - Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi hasil pengawasan atas akuntabilitas badan usaha	Baseline
10	BLU/BLUD, BUMD, BUMDES	105285	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Akuntan negara	49.UAG.U03 - Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi hasil pengawasan kinerja pembangunan atas program prioritas nasional yang ditargetkan	Baseline
11	BUMD (Fokus pada BU Jasa Air dan BPD)	102838	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Akuntan negara	49.FAG.U06 - Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi hasil pengawasan atas akuntabilitas badan usaha	Baseline
	BUMD (Fokus pada BU Jasa Air dan BPD)	103149	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Akuntan negara	49.FAG.U06 - Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi hasil pengawasan atas akuntabilitas badan usaha	Baseline
12	BUMN	102528	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Akuntan negara	49.FAG.U06 - Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi hasil pengawasan atas akuntabilitas badan usaha	Baseline
13	Deteksi Kecurangan	102313	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Investigasi	49.UAG.U03 - Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi hasil pengawasan kinerja pembangunan atas program prioritas nasional yang ditargetkan	Baseline
	Deteksi Kecurangan	107287	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Investigasi	49.FAG.U03 - Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi Hasil Pengawasan Kinerja Pembangunan	ABT
14	Evaluasi pada Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan	103810	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat	49.UAG.U03 - Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi hasil pengawasan kinerja pembangunan atas program prioritas nasional yang ditargetkan	Baseline
15	Evaluasi pada Perguruan Tinggi	103809	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat	49.UAG.U03 - Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi hasil pengawasan kinerja pembangunan atas program prioritas nasional yang ditargetkan	Baseline
16	Fasilitas Kredit Pemerintah untuk UMKM (KUR dan subsidi bunga/subsidi margin KUR baik reguler maupun tambahan)	103025	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Akuntan negara	49.UAG.U03 - Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi hasil pengawasan kinerja pembangunan atas program prioritas nasional yang ditargetkan	Baseline

No	Kode	Target		Realisasi	Capaian	Rincian SHP sudah Final	
		Program/Kegiatan/Rincian Output (RO)	Vol (lap)	(Lap)			
						30	Respons Kecurangan TW 2
						31	Reviu Tata Kelola Proyek Strategis Nasional (PSN) TW 3
						32	BLU/BLUD, BUMD, BUMDES
						33	Evaluasi pada Perguruan Tinggi
						34	Pengawasan atas Proyek Prioritas Strategis RKP Tahun 2022
						35	Penanganan Covid-19-Pembayaran Klaim RS TW IV
2	3701.UAG.U09	Rekomendasi hasil pengawasan manajemen risiko atas kualitas pengendalian Intern Pemerintah Daerah	2	2	100,00	1	SPIP
						2	Kapabilitas APIP
3	3701.UAG.U10	Rekomendasi hasil pengawasan manajemen risiko atas kualitas pengendalian Intern Badan Usaha	1	3	300,00	1	Kontribusi atas pembangunan nasional TW 1
						2	Kontribusi atas pembangunan nasional TW 2
						3	Kualitas Pengendalian Intern
Jumlah C			24	40	166,67		
Jumlah Total			76	104	136,84		

No	Kode	Target		Realisasi	Capaian	Rincian SHP sudah Final	
		Program/Kegiatan/Rincian Output (RO)	Vol (lap)	(Lap)			
						42	Reviu Pembayaran Tunggakan Tunjangan Kinerja Guru dan Pengawas PNS Pendidikan Agama Kristen Kemenag
Jumlah B			39	43	110,26		
C	UAG	Pengawasan Pembangunan Baseline					
1	3701.UAG.U03	Rekomendasi hasil pengawasan kinerja pembangunan atas program prioritas nasional yang ditargetkan	21	35	166,67	1	Audit Keuangan atas Pinjaman dan Bantuan Luar Negeri TW II
						2	Audit Keuangan atas Pinjaman dan Bantuan Luar Negeri TW III
						3	Audit Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) Kementerian PUPR
						4	Bantuan Operasional Sekolah
						5	Bantuan Pemerintah untuk Usaha Mikro
						6	Bantuan Tunai bagi Pedagang Kaki Lima, Warung, dan Nelayan
						7	Bimtek Manajemen Risiko Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Tahun 2024 pada KPU dan Bawaslu TW 3
						8	Deteksi Kecurangan(TW 3)
						9	Evaluasi pada Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
						10	fasilitas kredit Pemerintah untuk UMKM (KUR) dan subsidi bunga/subsidi margin KUR baik
						11	Implementasi Bansos APBD
						12	Implementasi Bansos APBDesa
						13	Implementasi Bansos APBN (PKH, Kartu Sembako, Kartu Prakerja)
						14	Kebijakan Peningkatan Kualitas Pendidikan Nasional
						15	Optimalisasi Pemanfaatan KPBU
						16	P3DN Nasional TW 2
						17	Penanganan Covid-19-PBJ (Alat Testing/Tracing, Almatkes, Obat dan Faskes)
						18	Penanganan Covid-19-Pembayaran Klaim RS TW III
						19	Penanganan Covid-19-Vaksinasi
						20	Penempatan Dana
						21	Penguatan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi
						22	Peningkatan Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Daerah TW 1
						23	Peningkatan Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Daerah TW 2
						24	Peningkatan Tata Kelola Data Terpadu Penerima Manfaat Bantuan Pemerintah (DTKS dan Basis Data Terkait Lainnya)
						25	Percepatan Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah TW 1
						26	Percepatan Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah TW 2
						27	Percepatan Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah TW 3
						28	Program Indonesia Pintar (KIP dan KIP Kuliah)
						29	Respons Kecurangan TW 1

No	Kode	Target		Realisasi	Capaian	Rincian SHP sudah Final	
		Program/Kegiatan/Rincian Output (RO)	Vol (lap)	(Lap)			
2	3701.FAG.003	Rekomendasi Hasil Pengawasan Kinerja Pembangunan				6	Reformasi Birokrasi
						7	Tata Kelola Cadangan Pangan Pemerintah
						8	Tata Kelola Subsidi Pupuk
						9	P3DN Pemerintah Daerah
						10	Tata Kelola Cadangan Pangan Pemerintah Daerah
						11	P3DN Badan Usaha
						12	Pengembangan Kewirausahaan, Kemitraan dan Keperantaraan
						13	Optimalisasi Program Padat Karya
						14	Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa
						15	Deteksi Kecurangan TW IV (ABT)
						16	Respons Kecurangan (TW III ABT)
						17	Respons Kecurangan (TW IV ABT)
						18	Reformasi Sistem Kesehatan-Layanan Primer
						19	Reformasi Sistem Kesehatan-Kualitas dan Redistribusi Tenaga Kesehatan
						20	Infrastruktur Sistem Pengolahan Air Limbah (SPAL)
						21	Infrastruktur Jalan Tol
						22	Pembangunan Jalur Kereta Api (termasuk kereta cepat Jkt - Bdg)
						23	Reviu Tata Kelola Proyek Strategis Nasional (PSN) (TW IV ABT)
						24	P3DN Nasional (TW III ABT)
						25	P3DN Nasional (TW IV ABT)
						26	Pencegahan Kecurangan(TW IV ABT)
						27	Peningkatan Akses Permodalan TW 3 (ABT)
						28	Stunting (ABT) TW 3
						29	Pengembangan Potensi Desa TW 3 (ABT)
						30	Bantuan Stimulus kepada Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pada Masa Pandemi Covid-19
						31	pembangunan Jalan
						32	Infrastruktur SPAM
						33	Kartu Indonesia Pintar
						34	Kartu Indonesia Sehat
						35	P3DN Pemerintah Daerah
						36	Penanggulangan Bencana
						37	Pengawasan Pengadaan PPPK
						38	Pengawasan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Minyak Goreng PKL dan Warung yang disalurkan oleh TNI dan Polri
						39	Pengembangan DPSP
						40	PKH
						41	Reformasi Sistem Kesehatan-Layanan Rujukan

**REALISASI RINCIAN OUTPUT (RO)
(SHP FINAL)
SAMPAI DENGAN 30 DESEMBER 2022**

No	Kode	Target		Realisasi	Capaian	Rincian SHP sudah Final	
		Program/Kegiatan/Rincian Output (RO)	Vol (lap)	(Lap)			
A	FAG	Pengawasan Pembangunan (baseline)					
1	3701.FAG.005	Rekomendasi hasil pengawasan kinerja pembangunan atas program pembangunan regional	2	2	100,00	1	Kemudahan Perizinan (OSS)
						2	Pengawasan atas Pengelolaan Sampah Terpadu (PST) Piyungan
2	3701.FAG.011	Rekomendasi hasil pengawasan pengembangan JFA	1	1	100,00	1	Penerapan JFA pada APIP K/L/D
3	3701.FAG.012	Hasil Koordinasi Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan, dan Tindak Lanjut	1	2	200,00	1	LKjIP
						2	Lapsub
4	3701.FAG.U02	Rekomendasi hasil pengawasan atas akuntabilitas keuangan daerah	7	10	142,86	1	Optimalisasi PAD
						2	Pemanfaatan APBD untuk PC-PEN (termasuk TKDD); TW 1
						3	Pemanfaatan APBD untuk PC-PEN (termasuk TKDD); TW 2
						4	Peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran pemerintah daerah
						5	Percepatan Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah TW 1
						6	Percepatan Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah TW 2
						7	Percepatan Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah TW 3
						8	Tata Kelola dan Akuntabilitas Aset Desa
						9	Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Desa TW 1
						10	Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Desa TW 2
							Tata Kelola dan Perencanaan Pembangunan Desa
5	3701.FAG.U06	Rekomendasi hasil pengawasan atas akuntabilitas badan usaha	1	3	300,00	1	BLU/BLUD (Fokus pada BLU/BLUD Kesehatan dan BLU/BLUD Pendidikan)
						2	BUMD (Fokus pada BU Jasa Air dan BPD)
						3	BUMN
6	3701.FAG.U07	Rekomendasi hasil pengawasan pengendalian korupsi	1	3	300,00	1	Pencegahan kecurangan TW1
						2	Pencegahan kecurangan TWII
						3	Pencegahan kecurangan TWIII
Jumlah A			13	21	161,54		
B.	FAG	Pengawasan Pembangunan (ABT)					
1	3701.FAG.001	Rekomendasi Hasil Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Negara dan Daerah dalam rangka Pemulihan Ekonomi	1	1	100,00	1	Peningkatan Kualitas Belanja Pemerintah Daerah, melalui Ketepatan dan Efektivitas Penggunaan Dana Transfer (fokus pada sektor pendidikan dasar dan menengah)
			38	42	110,53	1	Kartu Sembako
						2	Pembangunan Bandara
						3	Pengembangan Keterampilan dan Layanan Usaha
						4	Peningkatan Aset Produktif
						5	Peningkatan Sarana-Prasarana Pendidikan

PERWAKILAN BPKP D.I. YOGYAKARTA
Realisasi Penyerapan Anggaran
s.d. Desember 2022

No	Kode	Program/IKK	Anggaran			Realisasi s.d. Bulan Ini (Rp)	% Capaian Penyerapan	
			Tahun 2022 (Rp)	s.d. Bulan Ini (Rp)	2022 (%)		Terhadap Rencana s.d. Bulan Ini (%)	
			3	4	6=5/3*100		7=5/4*100	
1		2			5			
A		Program Pengawasan Pembangunan						
1	089.01.CH	Rekomendasi Hasil Pengawasan Kinerja Pembangunan atas Program Pembangunan Regional	85.000.000,00	85.000.000,00	84.265.797,00	99,14%	99,14%	
2	FAG.005	Rekomendasi Hasil Pengawasan Pengembangan JFA	21.731.000,00	21.731.000,00	21.730.043,00	100,00%	100,00%	
3	FAG.011	Hasil Koordinasi Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Tindak Lanjut	45.784.000,00	45.784.000,00	45.325.343,00	99,00%	99,00%	
4	FAG.012	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Keuangan Daerah	191.782.000,00	191.782.000,00	191.779.634,00	100,00%	100,00%	
5	FAG.U02	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Badan Usaha	55.998.000,00	55.998.000,00	55.779.085,00	99,61%	99,61%	
6	FAG.U06	Rekomendasi Hasil Pengawasan Pengendalian Korupsi	28.180.000,00	28.180.000,00	28.180.000,00	100,00%	100,00%	
		Sub Jumlah Program A	426.475.000,00	426.475.000,00	427.059.902,00	99,67%	99,67%	
B		Program Pengawasan Pembangunan (ABT)						
1	089.01.CH	Rekomendasi Hasil Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Negara dan Daerah dalam rangka Pemulihan Ekonomi	59.566.000,00	59.566.000,00	59.240.880,00	99,45%	99,45%	
2	FAG.001	Rekomendasi Hasil Pengawasan Kinerja Pembangunan	2.331.292.000,00	2.331.292.000,00	2.290.649.330,00	98,26%	98,26%	
		Sub Jumlah Program B	2.390.858.000,00	2.390.858.000,00	2.349.890.210,00	42,19%	98,29%	
C		Program Pengawasan Pembangunan						
1	089.01.CH	Rekomendasi Hasil Pengawasan Kinerja Pembangunan atas Program Prioritas Nasional yang Ditargetkan	1.089.910.000,00	1.089.910.000,00	1.088.384.877,00	99,86%	99,86%	
2	UAG.U03	Rekomendasi Hasil Pengawasan Manajemen Risiko atas Kualitas Pengendalian Intern Pemerintah Daerah	133.355.000,00	133.355.000,00	133.253.818,00	99,92%	99,92%	
3	UAG.U09	Rekomendasi Hasil Pengawasan Manajemen Risiko atas Kualitas Pengendalian Intern Badan Usaha	82.487.000,00	82.487.000,00	82.383.230,00	99,87%	99,87%	
		Sub Jumlah Program C	1.305.752.000,00	1.305.752.000,00	1.304.021.925,00	86,57%	99,87%	
		Jumlah Program Pengawasan	4.125.085.000,00	4.125.085.000,00	4.080.972.037,00	98,93%	98,93%	
D		Program Dukungan Manajemen						
1	089.01.WA	Layanan Umum	456.280.000,00	456.280.000,00	456.275.427,00	100,00%	100,00%	
2	3676.EBA.962	Layanan Perkantoran	26.427.946.000,00	26.427.946.000,00	26.153.425.310,00	98,96%	98,96%	
		Layanan Sarana Prasarana Internal	307.000.000,00	307.000.000,00	306.998.950,00	100,00%	100,00%	
		Jumlah Program Dukungan Manajemen	27.191.226.000,00	27.191.226.000,00	26.916.699.687,00	98,99%	98,99%	
		Total	31.316.311.000,00	31.316.311.000,00	30.997.671.724,00	98,98%	98,98%	